

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

# **SURVEY NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN PADA KELOMPOK PEREMPUAN MARGINAL DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN KUPANG TAHAP II**

*Oleh:*

**Tim Peneliti Bengkel APPeK**

*Dilaksanakan Atas Kerjasama:*

**Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan  
Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK)  
dan The Asia Foundation**

**2013**



**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**SURVEY NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN  
PADA KELOMPOK PEREMPUAN MARGINAL  
DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN  
KUPANG TAHAP II**

*Oleh :*

**TIM PENELITIAN  
BENGKEL APPeK**

*Dilaksanakan Atas Kerjasama:*  
**Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan  
Kampung (Bengkel APPeK)  
Dan The Asia Foundation  
2013**

## Kata Pengantar

Survey nilai-nilai kewargaan pada kelompok perempuan marginal di Kota dan Kabupaten Kupang tahap II ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Bengkel APPeK menilai kemajuan program pendidikan pemilih di wilayah Kabupaten dan Kota Kupang. Program pendidikan pemilih di kedua wilayah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong perubahan pengetahuan, pemahaman kelompok perempuan marginal tentang isu demokrasi, politik dan pemilu khususnya. Muaranya adalah menjadi proses pemilu bukan sekedar proses “memilih” semata pada pemilu dari kelompok perempuan, namun menjadikan pemilu sebagai arena aktif dari warga negara mempengaruhi proses politik.

Hasil survey tahap II ini menunjukkan sejumlah kemajuan yang cukup berarti di kalangan kelompok perempuan marginal. Kelompok ini mulai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang politik dan pemilu. Politik/pemilu yang selama ini dipahami sekedar sebagai kewajiban mulai dilihat sebagai hak warga negara. Melihat politik sebagai hak menunjukkan ada nuansa keaktifan warga negara terhadap peristiwa politik. Di saat bersamaan, antusiasme kelompok perempuan terhadap proses pemilu nampaknya juga meningkat. Informasi pemilu yang selama ini relatif tidak diakses secara baik, mulai diakses secara lebih baik dengan sumber informasi yang bervariasi pula.

Politik uang dan primodialisme yang selama ini menjadi “penyakit demokrasi” mulai dapat diidentifikasi dan dipahami secara kritis oleh kelompok perempuan. Harus diakui politik uang dipraktekan oleh aktor politik sudah lebih canggih bentuknya seiring meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu, media dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian politik uang dan primodialisme akan susah dilawan jika kesadaran kritis dari warga akan bentuk dan bahaya penyakit ini terhadap proses demokrasi.

Akhirnya kami ucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam survey ini. Terima kasih tersebut ditujukan kepada Rudi Rohi, Msi selaku peneliti, tim pengumpul data, tim entry data serta anggota forum perempuan serta non forum perempuan yang sudah bersedia diwawancarai. Hasil penelitian ini tidak akan tersaji dengan baik tanpa kontribusi para pihak ini.

Terima kasih juga ditujukan kepada tim program pendidikan pemilih Bengkel APPEK yang selama ini sudah melakukan pendidikan pemilih di Kota dan Kabupaten Kupang. Kerja keras tim telah terlihat pada hasil survey ini. Akhirnya terima kasih kepada tim AIESP The Asia Foundation yang sudah mendukung program pendidikan pemilih termasuk survey ini.

Salam,

Tim Program Pemilih Bengkel APPEK

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat adalah individu dan kelompok yang tidak akan pernah mati dan terus berdinamika. Oleh karena itu eksistensi negara hanya dapat terjadi bila kita secara kolektif mendorong masyarakat untuk mampu menyadari dan mengaplikasikan kedudukannya sebagai warga negara. Kewarganegaraan yang dipahami dan dijalankan oleh setiap individu maupun kelompok akan melahirkan aktor dan institusi yang menempatkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai kolektifitas warga negara. Salah satu yang paling mendasar adalah kesadaran warga negara dalam pemilu di setiap levelnya. Masyarakat harus mampu menyeimbangkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi ketika melakukan kontrak politik lewat pemilu.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu bukan karena dimobilisasi atau “latah demokrasi” semata. Akan tetapi kontrak politik lewat pemilu terjadi karena kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai warga negara berpartisipasi, mengakses, dan mengontrol proses pemilu dan rezim yang dihasilkan beserta penyelenggaraan pemerintahannya. Partisipasi, akses, dan kontrol warga negara tersebut mesti dibingkai dalam nilai-nilai kewarganegaraan yang komprehensif dan seimbang antara imajinasi dan praksis.

Menariknya lagi, masyarakat dalam berbagai aktivitas pada umumnya dan pemilu khususnya, selalu menempatkan perempuan sebagai kaum marginal. Sebagai pemilih, perempuan lebih banyak terjebak dalam ketiadaan kesempatan dan ketidakmampuan berpartisipasi, mengakses, dan apalagi mengontrol proses dan hasil pemilu. Hasil studi dari banyak kalangan telah memperlihatkan kenyataan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kaum perempuan di Kota dan Kabupaten Kupang, hampir seluruhnya merupakan kaum marginal yang suaranya nyaris tak bergema dari pemilu ke pemilu.

Survey sebelumnya menunjukkan bahwa pemilih khususnya perempuan sangat dipengaruhi oleh ikatan-ikatan emosional yang jauh dari kesadarannya sebagai warga negara (Rohi, 2009). Bahkan dalam aktivitas pendampingan yang

dilakukan oleh Bengkel APPEK di wilayah Kota dan Kabupaten Kupang selalu dihadapkan pada persoalan marginalisasi kaum perempuan di ruang publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, Bengkel APPEK melakukan suatu survey untuk mengetahui tingkat kesadaran kewarganegaraan di kalangan kaum perempuan di Kota dan Kabupaten Kupang. Survey tersebut selanjutnya digunakan dalam merancang suatu program intervensi terhadap kaum perempuan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah memberikan pendidikan kewarganegaraan terhadap kaum perempuan di daerah survey oleh Bengkel APPEK sehingga dapat meningkatkan kemampuan pendidikan kewarganegaraan para perempuan yang menjadi kaum marginal.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan program ini, Bengkel APPEK kemudian melakukan survey kedua untuk melihat perubahan yang terjadi di kalangan perempuan marginal Kota dan Kabupaten Kupang setelah selesai program pendampingan. Aspek yang ingin dilihat adalah progresifitas dan dampak yang muncul sesudah program pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan. Dengan demikian survey ini tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari survey sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah terjadi perubahan pemahaman dan aplikasi nilai-nilai kewargaan di kelompok perempuan dalam konteks relasi sesama warga negara dan warga negara dengan negara di Kota dan Kabupaten Kupang?
2. Apakah terjadi perubahan progresif?
3. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya intervensi program pendidikan kewargaan yang telah selesai dilakukan Bengkel APPEK?

## **C. Tujuan**

Survei ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui perubahan progresif yang terjadi pada kaum perempuan marginal di Kota dan Kabupaten Kupang setelah program pendidikan kewargaan selesai dilakukan oleh Bengkel APPEK;

2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perubahan progresif yang terjadi pasca intervensi pendidikan kewargaan lewat program pendidikan kewargaan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Menurut Branka (2009) *civic education* harus diletakan dalam kerangka politik dan demokrasi. Secara politik, *civic education* akan menjadi alat pembelajaran politik bagi setiap individu dalam negara untuk memahami berbagai macam nilai yang dijadikan landasan bernegara. Demokrasi pada titik tertentu menjadi alat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kehidupan bernegara. Sementara itu, Syvertsen dkk (2007) membagi model civic education ke dalam empat bagian utama yakni (1) Civic Skill, (2) Civic Engagement, (3) Awareness of Civic Issues and Concepts, and (4) Specific Activities.

*Civic education* (Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan komponen pendidikan demokrasi yang sangat penting karena menanamkan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan otonom dalam kehidupan publik. Partisipasi tersebut terutama dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya dengan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang dibutuhkan. Partisipasi dalam kehidupan publik (partisipasi politik) termasuk di dalamnya berpartisipasi dalam pemilu(kada). Melalui *Civic Education*, warga negara disiapkan menjadi pemilih yang rasional dan belajar berdemokrasi melalui lembaga-lembaga demokrasi termasuk pemilu (kada).

*Civic education* ketika diletakan dalam konteks pemilu(kada) pada dasarnya berkaitan dengan nilai dan praksis relasi antar warga negara serta warga negara dengan negara. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat akan menentukan pola relasi yang terbangun di antara keduanya baik dalam proses pemilu(kada) maupun proses pemerintahan pasca pemilu (kada). Oleh karena itu, nilai kewarganegaraan akan juga menentukan kualitas kehidupan bersama termasuk kehidupan politik dan demokrasi.

Kerangka pikir yang dibangun dalam kajian ini meletakkan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pemilu(kada) meliputi proses pemilu(kada) dan

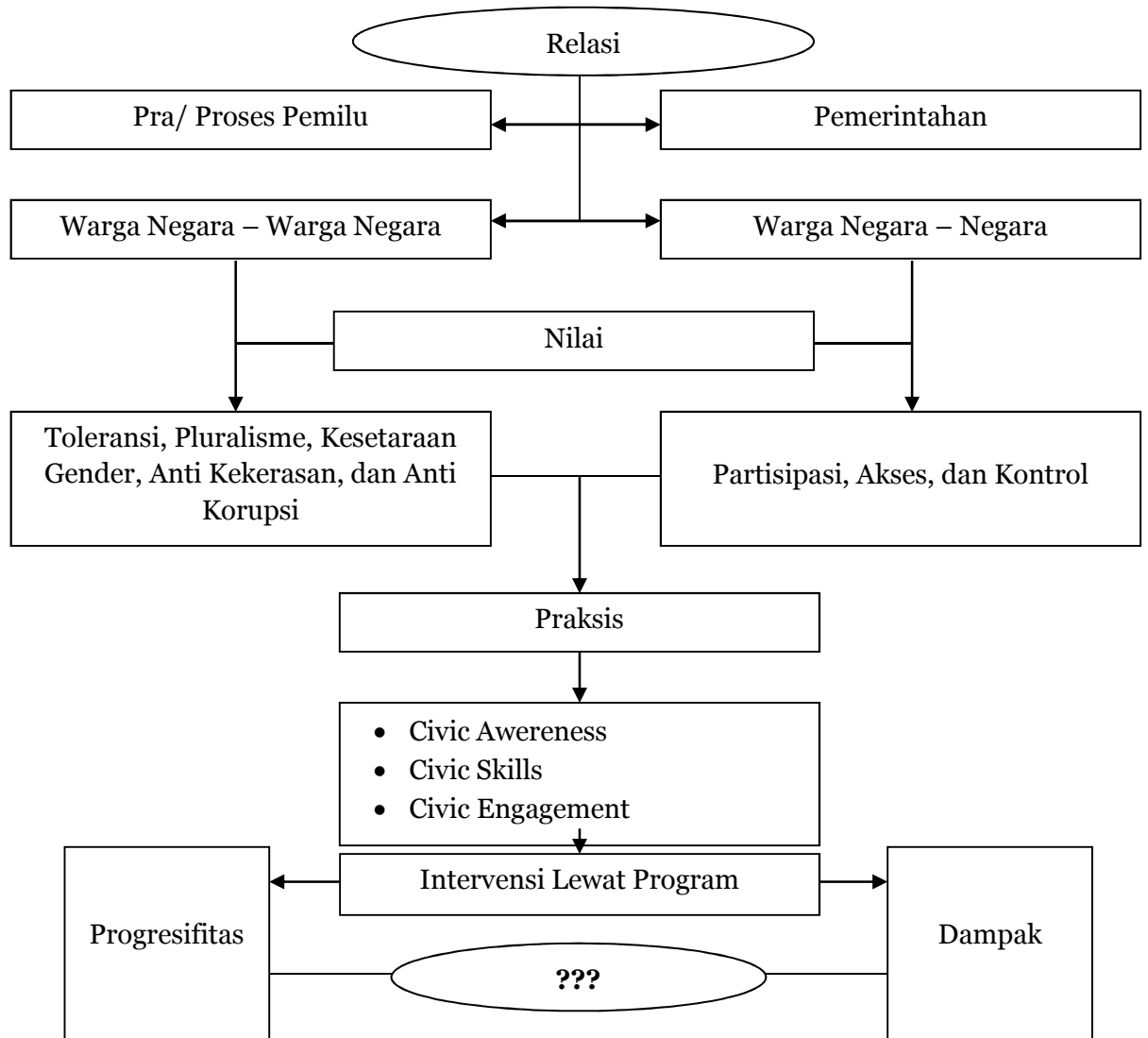
pemerintahan dengan setting relasi pada dua level. Pertama, relasi antara sesama warga negara. Kedua, relasi antara warga negara dengan negara.

Pada level nilai, kajian ini akan mengidentifikasi seberapa eksis dan kuat nilai-nilai seperti toleransi, pluralisme, kesetaraan gender, anti kekerasan, dan anti korupsi ketika warga negara saling berelasi dan dalam relasi warga negara dengan negara yang dilihat dari partisipasi akses dan kontrol warga dalam proses pemilu(kada) dan proses pemerintahan (pelayanan publik dan kebijakan publik).

Secara lebih praktis operasional praktek kewargaan ini akan dilihat pada civic awareness, skills, dan engagement terutama di lokus survey masing-masing. Tiga model civic ini sekaligus menjadi tingkatan dari kesadaran kewarganegaraan. Tingkat kewarganegaraan yang baik harus bisa mensinergiskan antara kesadaran akan nilai-nilai kewarganegaraan (awareness), dan kemampuan praktisnya (skill) serta mengkat seluruh warga negara sebagai suatu pola kesadaran bersama (engagement). Kesadaran seperti ini dikategorikan sebagai civic engagement. Sedangkan civic awareness dapat dijelaskan sebagai kesadaran kewarganegaraan tanpa skill praktis. Dan, civic skill adalah tingkat kesadaran kewarganegaraan yang dibarengi dengan kemampuan praktis tetapi tidak diikuti dengan keterikatan bersama sebagai tanggung jawab praktis. Uraian ini dapat dilihat pada skema berikut :



**E. Skema Alur Pikir**



## **F. Metodologi**

### *1. Metode dan Jenis Survey*

Survey ini ingin menemukan progresifitas nilai-nilai kewargaan dan praksisnya terutama dalam konteks pemilu.

### *2. Populasi & Responden*

Target populasi dari survey ini adalah semua responden yang mengikuti survey pertama sebelumnya. Jumlahnya sebanyak 1.000 orang. Sedangkan responden terdiri atas kaum perempuan marginal yang mengikuti survey awal lalu ditindaklanjuti dengan mendapatkan intervensi pendidikan kewargaan dan kaum perempuan yang mengikuti survey awal tetapi tidak mendapatkan intervensi pendidikan kewargaan lewat program yang dijalankan oleh Bengkel APPEK.

### *3. Teknik Sampling*

Survey ini dilakukan dengan menggunakan *purposive random sampling*. Sementara itu disamping mengambil sample secara acak, penentuan jumlah responden dilandaskan pada tingkat kesalahan 5% dan tingkat kefidensi 95%. Adapun penentuan jumlah respondennya menggunakan *sample size calculator* diperoleh total jumlah responden sebanyak 400 orang dari populasi berjumlah 1.000. Dikarenakan populasinya berada di 2 area berbeda yakni Kota dan Kabupaten Kupang, maka pengambilan sampelnya dibagi menjadi tiap kelurahan atau desa sebanyak 10 orang yang mengikuti program dan 10 yang yang tidak mengikuti program pendidikan kewargaan dari masing-masing 10 kelurahan di Kota dan 10 desa di Kabupaten Kupang.

### *4. Area Survey*

Survey akan dilakukan di Kabupaten Kupang pada 10 desa dan Kota Kupang sebanyak 10 kelurahan. Sedangkan sebarannya akan dipilih secara acak.

**Tabel 1 Area Survey**

Wilayah			
Kabupaten/ Kota		Kecamatan	Kelurahan
Kota Kupang	1	Oebobo	Oetete
			Fatululi
	2	Kota Radja	Bakunase I
			Naikoten II
	3	Kota Lama	Pasir Panjang
			Tode Kiser
	4	Alak	Alak
			Manutapen
	5	Kelapa Lima	Oesapa
			Lasiana
	6	Maulafa	Naimata
			Belo
Kabupaten Kupang	7	Sulamu	Oeteta
			Bipolo
	8	Fatuleu	Sillu
			Ekateta
	9	Fatuleu Tengah	Passi
			Nunsaen
	10	Fatuleu Barat	Nuataus
			Tuakau
	11	Amabi Oefeto Timur	Oemofa
			Oemolo

5. *Pengambilan Data & Analisis*

Pengambilan data akan dilakukan dengan kuisisioner dan wawancara mendalam terhadap responden. Kuisisioner akan menggunakan model atau jenis pertanyaan *closed ended* (“yes or no” answer, multiple choice & scaled) dan *open ended*.

Setelah semua data terkumpul dilakukan *reduce, classify, and organize* data. Data kemudian diproses dengan menggunakan SPSS dengan analisis deskriptif. Hasilnya kemudian akan dituangkan dalam laporan.

### **Kerangka Kuisisioner**

Kerangka kuisisioner meliputi beberapa aspek yang diteliti dengan indikator-indikator antara lain seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. Aspek dan Indikator Survey**

Aspek	Relasi Setelah Intervensi Program	
	Warga Negara dengan Warga Negara	Warga Negara dengan Negara
Nilai Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toleransi</li><li>• Pluralisme,</li><li>• Kesetaraan Gender,</li><li>• Anti Korupsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Partisipasi</li><li>• Akses</li><li>• Kontrol</li></ul>
Praxis Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Civic Skills</li><li>• Civic Engagement</li><li>• Civic Awereness</li></ul>	
Intervensi Program	<ul style="list-style-type: none"><li>• Progresifitas</li><li>• Dampak</li></ul>	

## **BAB II ANALISIS HASIL**

### **A. Pengantar**

Setelah dilakukan survey sebelumnya terkait tingkat kesadaran kewargaan atau kewarganegaraan, Bengkel APPEK menindaklanjutinya dengan dibentuknya forum perempuan di Kota dan Kabupaten Kupang sebagai wadah bagi kelompok perempuan dalam berproses dalam pendidikan pemilih. Tujuan dibentuknya forum ini tentu saja untuk mendampingi kaum perempuan marginal di kedua daerah otonom tersebut agar ditingkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai kewargaan dan kedudukan sebagai warga negara.

Jika survey terdahulu dilakukan terhadap 1.000 orang responden secara acak dari seluruh jumlah perempuan yang tersebar di Kota sebanyak 600 orang dan Kabupaten Kupang sebanyak 400 orang, maka survey kali ini dilakukan hanya terhadap 400 orang perempuan marginal dengan komposisi masing-masing area survey sebanyak 200 responden.

Tujuan survey ini untuk mengetahui perubahan dan dampak yang dihasilkan oleh dan dengan adanya forum perempuan. Oleh karena itu, hasil dari survey ini dalam analisisnya difokuskan pada perbandingan dengan hasil survey terdahulu di mana perempuan pada dua area survey tersebut difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran kewargaan melalui forum perempuan. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan kesadaran kewargaan. Seluruh variabel di atas menggunakan kesadaran partisipasi terhadap pemilu legislatif sebagai indikator utama.

### **B. Profil dan Perempuan Marginal**

Responden berupa perempuan marginal dalam survey lanjutan ini terbagi atas 2 kategori dari total 400 responden di mana 200 orang di Kota dan 200 di Kabupaten Kupang. Pertama, perempuan marginal yang pernah menjadi responden atau tidak terlibat sebagai responden pada survey kali lalu yang dilakukan Bengkel APPEK sebagai bagian rangkaian kegiatan yang sama dengan

survey ini. Perempuan marginal dengan latar belakang ini di Kota Kupang terdapat 58,0% dan 62,0% di Kabupaten Kupang belum pernah mengikuti atau terlibat survey sebelumnya untuk rangkaian kegiatan yang sama. Sebanyak 40,5% di Kota dan 38,0% di Kabupaten Kupang merupakan responden yang sama dengan responden pada survey kali lalu. Sedangkan 1,5% di Kota dan 0,0% di Kabupaten Kupang adalah mereka yang tidak tahu mengenai rangkaian kegiatan survey ini. Lihat tabel berikut.

Tabel 3, Keterlibatan Responden Pada Survey Terdahulu

Pernah Ikut Survey				
Varian	Kota		Kabupaten	
	Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
Tidak Jawab	3	1.5	0,0	0,0
Pernah	81	40.5	76	38.0
Tidak Pernah	116	58	124	62.0
Total	200	100	200	100.0

Sumber: Hasil Survey

Kedua, perempuan marginal yang mengikuti program Bengkel APPEK berupa Forum Perempuan. Terdapat responden sebesar 59,0% di Kota dan 49,0% di Kabupaten Kupang dari perempuan marginal yang terlibat Forum Perempuan yang dibentuk dan diselenggarakan Bengkel APPEK. Sementara itu ada responden setidaknya 35,0% di Kota dan 46,0% di Kabupaten Kupang yang tidak terlibat sama sekali dengan Forum Perempuan Bengkel APPEK. Namun ada sejumlah responden (6,0%) di Kota dan (5,0%) di Kabupaten Kupang yang tidak pernah tahu mengenai rangkaian kegiatan ini. Lihat tabel berikut.

Tabel 4, Responden Yang Terlibat Forum Perempuan Bengkel APPEK

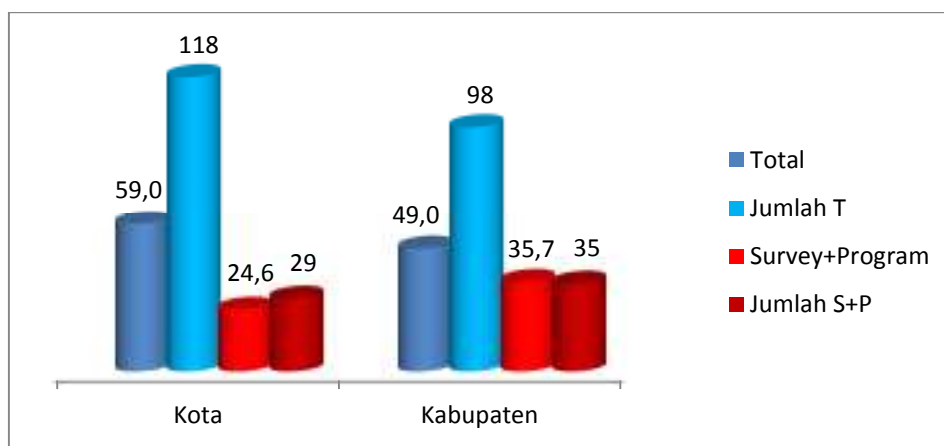
Terlibat Program				
Varian	Kota		Kabupaten	
	Frekuensi	Prosentase	Frequency	Percent
Tidak Jawab	12	6.0	10	5.0
Ya	118	59.0	98	49.0
Tidak	70	35.0	92	46.0
Total	200	100.0	200	100.0

Sumber: Hasil Survey

Bila dilihat lebih jauh, tidak semua perempuan marginal yang menjadi responden survey terdahulu ikut sebagai peserta forum perempuan di Kota maupun Kabupaten Kupang. Sebanyak 59,0% kaum perempuan marginal di Kota Kupang yang mengikuti program forum perempuan terdapat hanya 24,6% yang merupakan responden pada survey terdahulu. Sebaliknya dari 35,0% perempuan marginal yang menjadi responden kali ini namun tidak pernah terlibat forum perempuan terdapat 61,4% adalah responden pada survey sebelumnya.

Sejalan dengan itu di Kabupaten Kupang dari 49,0% yang mengikuti forum perempuan terdapat 35,7%) yang merupakan responden pada survey terdahulu. Sejumlah perempuan marginal ini (46,0%) yang tidak terlibat forum perempuan di Kabupaten Kupang terdapat di dalamnya sebanyak 33,7% yang merupakan responden pada survey kali lalu. Lihat *chart* berikut.

Chart 1, Perempuan Marginal Yang Pernah Ikut Survey dan Terlibat Forum Perempuan



Sumber: Hasil Survey

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut di mana ada sejumlah perempuan marginal yang tidak pernah terlibat survey terdahulu tetapi mengikuti forum perempuan. Atau ada juga yang tidak mengikuti keduanya.

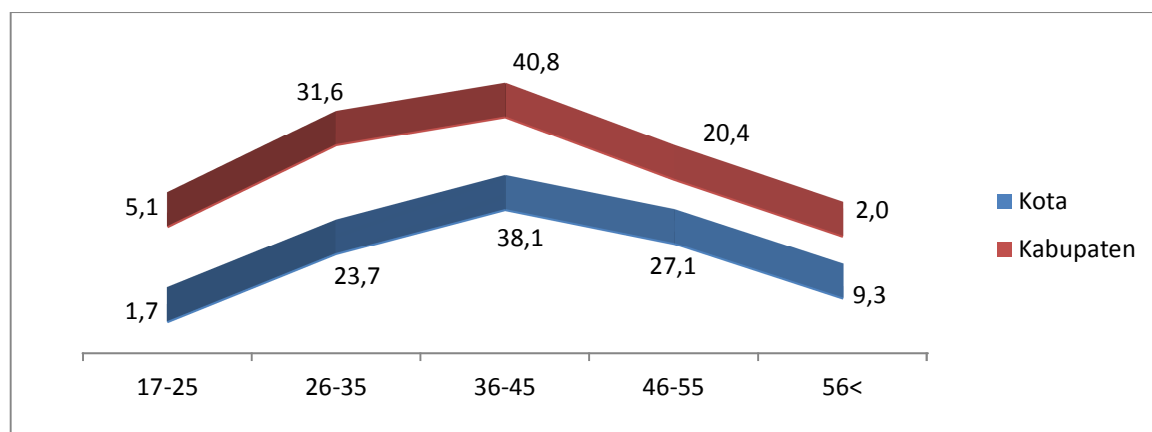
Tabel 5, Responden Yang Pernah Terlibat Survey Lalu Mengikuti Forum Perempuan

Ikut Survey Dulu	Terlibat Program Forum Perempuan															
	Tidak Jawab				Ya				Tidak				Total			
	Kota		Kabupaten		Kota		Kabupaten		Kota		Kabupaten		Kota		Kabupaten	
Tidak Jawab	2	16.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	0.0
Ya	9	75.0	10	100.0	29	24.6	35	35.7	43	61.4	31	33.7	81	40.5	76	38.0
Tidak	1	8.3	0	0.0	88	74.6	63	64.3	27	38.6	61	66.3	116	58.0	124	62.0
Total	12	6.0	10	14.3	118	59.0	98	49.0	70	35.0	92	46.0	200	100.0	200	100.0

Sumber: Hasil Survey

Jika disandingkan dengan tingkat usia responden kaitannya dengan keterlibatan kaum perempuan terhadap program forum perempuan, rata-rata tingkat partisipasi tertinggi ada pada mereka yang berusia antara 36-45 tahun. Tingkat partisipasi usia ini adalah yang tertinggi di Kota maupun Kabupaten Kupang. Sedangkan tingkat terendah adalah perempuan marginal dengan usia 17-25 tahun dan di atas 56 tahun. Lihat *chart* berikut.

Chart 2, Keterlibatan Perempuan Marginal Terhadap Forum Perempuan Menurut Usia



Sumber: Hasil Survey

Semakin muda usia responden, tingkat keterlibatannya dalam forum perempuan Bengkel APPEK semakin rendah. Hal senada juga terjadi pada tingkat usia responden yang semakin tua. Sedangkan puncak tertinggi dari tingkat usia partisipasi terhadap forum perempuan adalah kaum perempuan marginal pada usia

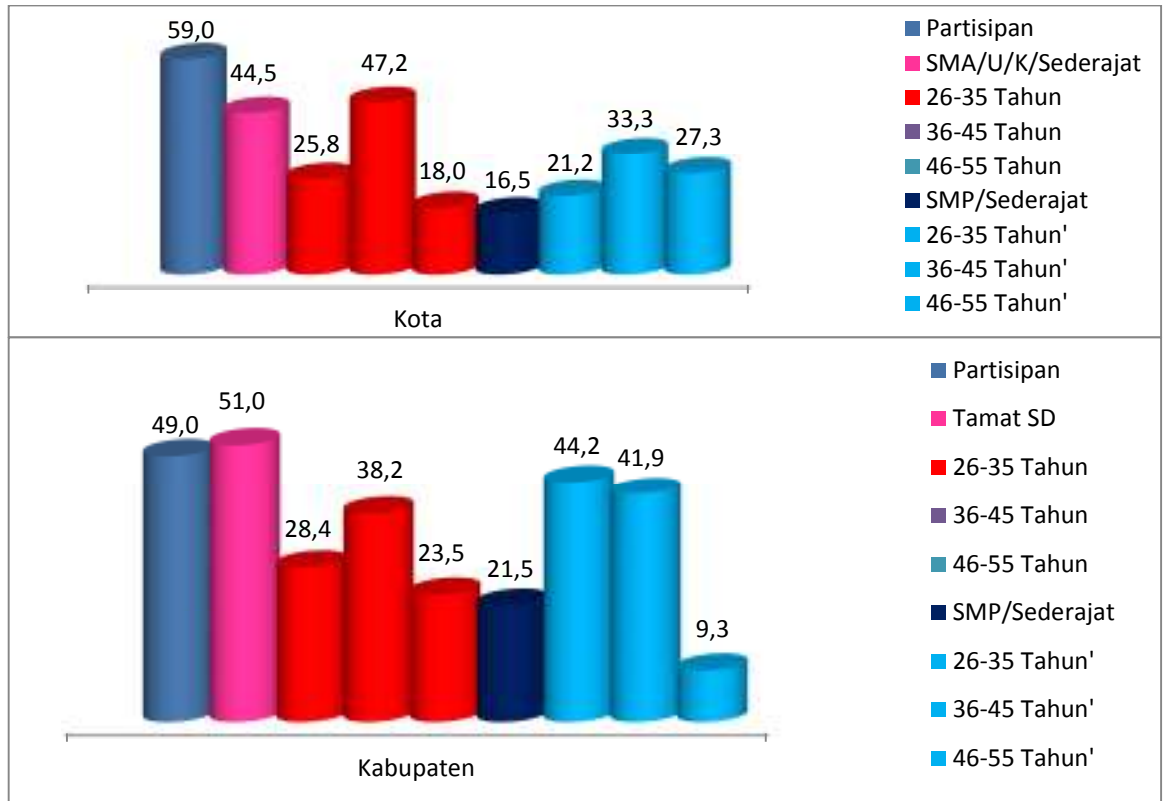


antara 36-35 tahun. Selain usia, perbedaan tingkat partisipasi tersebut bisa jadi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain semisal tingkat pendidikan, kesibukan pekerjaan, penghasilan, atau status perkawinan.

Hasil survey memperlihatkan bahwa dari 59,0% perempuan marginal di Kota Kupang yang terjun aktif dalam forum perempuan Bengkel APPeK didominasi oleh mereka dengan latar belakang sekolah menengah atas atau sederajat sebesar 44,5%. Sekiranya dari jumlah partisipan dengan tingkat pendidikan menengah atas atau sederajat ini paling banyak berusia antara 26-45 tahun di mana 25,8% berusia 26-35 tahun dan 47,2% berusia 36-45 tahun. Sementara partisipan forum perempuan dengan prosentase terendah adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan Diploma Empat (D4) atau Strata Satu (S1) yakni 1,5% dengan kisaran usia antara 26-45 tahun.

Sedangkan di Kabupaten Kupang, jumlah partisipan forum perempuan difasilitasi Bengkel APPeK sebanyak 49,0% kebanyakan berasal dari latar belakang tamatan sekolah dasar (SD). Perempuan marginal sebagai partisipan dari latar belakang pendidikan seperti ini berjumlah 51,0%. Jumlah prosentase ini di dalamnya didominasi juga oleh mereka yang berusia antara 26-45 tahun seperti halnya di Kota Kupang. Komposisinya adalah 4,9% usia 17-25 tahun, 28,4% usia 26-35 tahun, 38,2% usia 36-45 tahun, 23,5% usia 46-55 tahun, dan selebihnya 4,9% berusia di atas 56 tahun. Sementara prosentase partisipan terendah sama persis dengan para perempuan marginal di Kota Kupang dengan latar belakang pendidikan D4 atau S1. Lihat *chart* berikut.

Chart 3, Latar Belakang Pendidikan dan Usia Dominan Partisipan Forum Perempuan

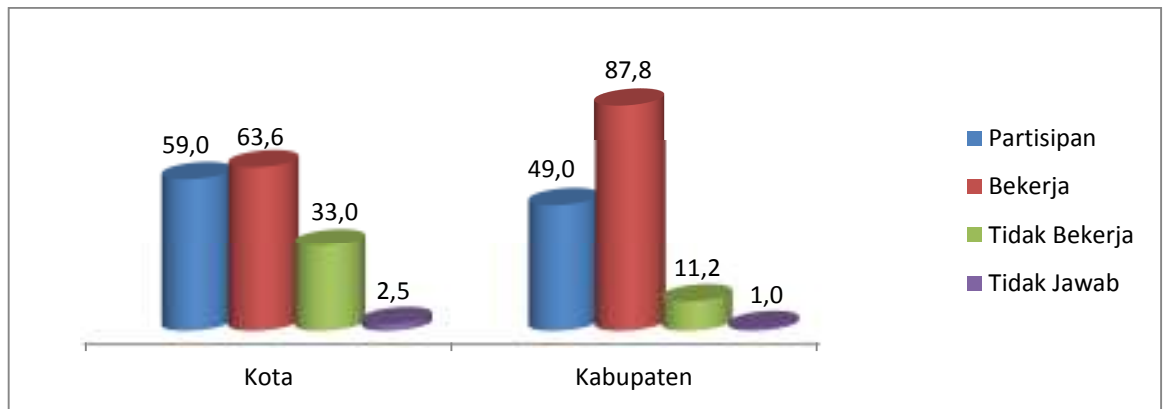


Sumber: Hasil Survey

Para perempuan marginal yang menjadi partisipan forum perempuan di Kota maupun Kabupaten Kupang mayoritas memiliki kesibukan dalam wujud pekerjaan keseharian. Misalnya di Kota Kupang, dari seluruh responden yang terlibat kegiatan forum perempuan, 63,6% mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Selebihnya adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran sebesar 33,9% dan 2,5% tidak memberikan jawaban. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan responden di Kabupaten Kupang di mana ada 87,8% responden yang ikut serta dalam program forum perempuan memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Sisanya sebesar 11,2% merupakan responden yang tidak bekerja dan 1,0% tidak memberikan jawaban. Hal menarik dari angka-angka ini adalah bahwa prosentase perempuan marginal yang bekerja dan terlibat forum perempuan di Kota Kupang lebih rendah dibandingkan dengan kaum perempuan marginal yang sama di Kabupaten Kupang. Artinya, ada sedikit kaitan antara

kesibukan pekerjaan dan pengaruhnya terhadap tingkat keterlibatan perempuan marginal dalam forum perempuan Bengkel APPEK. Lihat *chart* berikut.

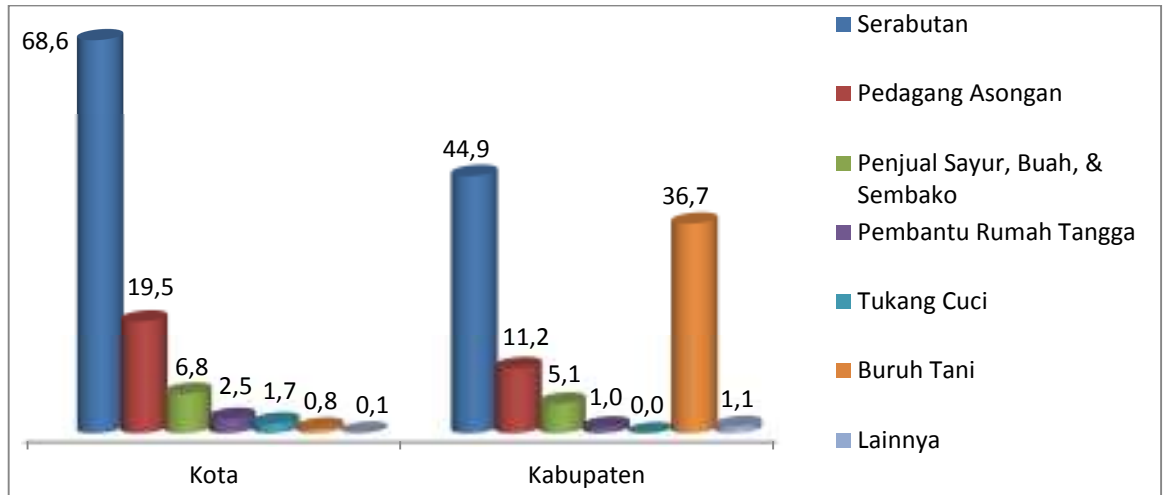
Chart 4, Latar Belakang Kesibukan Pekerjaan dan Keterlibatan Dalam Forum Perempuan



Sumber: Hasil Survey

Sebagian besar responden kaum perempuan marginal yang terlibat dalam forum perempuan tidak memiliki pekerjaan tetap. Meskipun begitu mereka selalu mempunyai kesibukan pekerjaan setiap harinya secara serabutan. Jenis responden ini sebesar 68,6% di Kota Kupang dan 44,9% di Kabupaten Kupang. Sedangkan bagi mereka dengan pekerjaan tetap ada sekitar 19,5% di Kota Kupang dan 11,2% di Kabupaten Kupang merupakan pedagang asongan. Selain itu berturut-turut di Kota dan Kabupaten Kupang ada juga pedagang sayur, buah, dan sembako (6,8% dan 5,1%), pembantu rumah tangga (2,5% dan 1,0%), tukang cuci (1,7% dan 0,0%), buruh tani (0,8% dan 36,7%), dan beberapa lainnya. Lihat *chart* berikut.

Chart 5, Latar Belakang Pekerjaan dan Keterlibatan Dalam Forum Perempuan



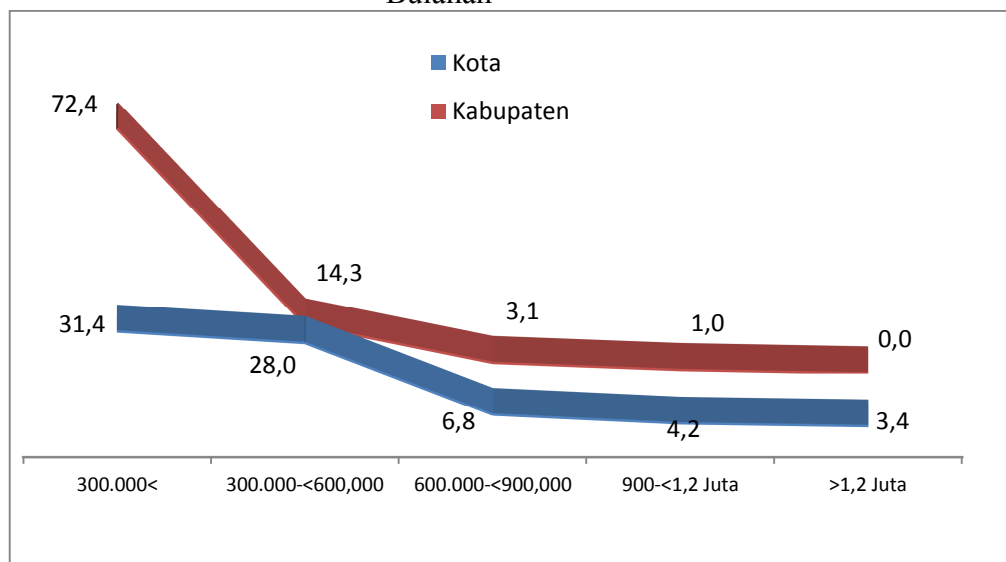
Sumber: Hasil Survey

Tingginya latar belakang pekerjaan responden yang terlibat dalam forum perempuan berupa pekerjaan serabutan bisa jadi disebabkan ketersediaan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan serabutan bukanlah rutinitas bila dilihat dari jenis kerjanya namun selalu dilakukan setiap hari dengan bentuk dan jenis yang berbeda. Dengan demikian, waktu bekerja serabutan untuk satu atau beberapa hari bisa ditiadakan sementara mengikuti kegiatan forum perempuan. Argumentasi ini juga bisa menjadi penjelasan bagi mereka yang bekerja dan enggan terlibat dalam forum perempuan di mana diperlihatkan oleh tingginya prosentase sebesar 60,0% di Kota dan 55,4% di Kabupaten Kupang.

Saat yang sama, keterlibatan dalam forum perempuan sejumlah responden dipengaruhi juga oleh besaran penghasilan bulanan. Hasil survey menunjukkan semakin kecil penghasilan responden semakin tinggi tingkat partisipasi dalam program forum perempuan. Sebaliknya makin tinggi penghasilan bulanan perempuan marginal akan berbanding terbalik dengan tingkat partisipasinya di forum perempuan. Responden sebanyak 59,0% di Kota Kupang dan 49,0% di Kabupaten yang terlibat dalam forum perempuan terdiri dari 31,4% di Kota dan 72,4% di Kabupaten berpenghasilan kurang dari Rp. 300.000. Berada di bawahnya adalah 28,0% responden di Kota dan 14,3% di Kabupaten Kupang

berpenghasilan antara Rp. 300.000 ke atas namun tidak lebih dari Rp. 600.000. lihat *chart* berikut.

Chart 6,  
Prosentase Perempuan Marginal Dalam Forum Perempuan Menurut Penghasilan Bulanan



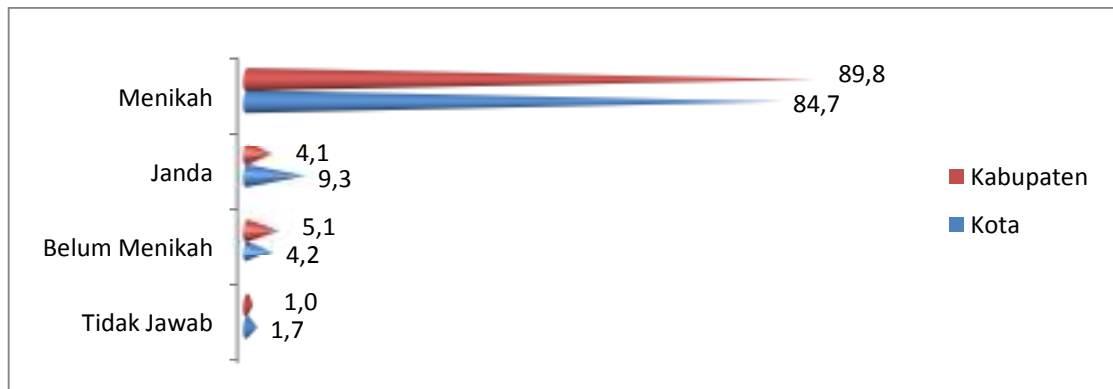
Sumber: Hasil Survey

Masih dalam urutan besaran penghasilan, 6,8% responden perempuan marginal di Kota dan 3,1% di Kabupaten Kupang berpenghasilan lebih dari Rp. 600.000 tetapi kurang dari Rp. 900.000. Kemudian 4,2% di Kota dan 1,0% di Kabupaten Kupang berpenghasilan antara Rp. 900.000 sampai dengan kurang dari Rp. 1.200.000. Berikutnya responden dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.200.000 hanya terdapat di Kota Kupang saja sebesar 3,4%. Selebihnya adalah responden dengan penghasilan yang tidak tetap dan tidak pasti.

Berbeda dengan fakta di atas, keterlibatan perempuan marginal dalam forum perempuan Bengkel APPEK di Kota dan Kabupaten Kupang ternyata tidak dipengaruhi oleh status perkawinan. Dugaan bahwa perempuan marginal yang sudah menikah – tidak termasuk janda – akan rendah keikutsertaan dalam forum perempuan karena harus melayani suami dan urusan rumah tangga rupanya tidak mendasar. Terbukti jumlah terbesar dari kaum perempuan yang ikut serta dan

aktif di forum perempuan adalah mereka yang sudah menikah sebesar 84,7% di Kota dan 89,8% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

Chart 7, Status Pernikahan Para Partisipan Forum Perempuan Bengkel APPEK



Sumber: Hasil Survey

Secara umum, profil dan latar belakang responden dalam hal ini kaum perempuan marginal turut mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam forum perempuan Bengkel APPEK. Tingkat pendidikan, kesibukan kerja dan jenis pekerjaan, dan penghasilan ikut memberikan kontribusi pengaruh terhadap tingkat partisipasi atau keterlibatan perempuan marginal dalam forum perempuan. Kecuali status pernikahan yang memang ditemukan fakta sebaliknya bahwa justru kaum perempuan marginal yang telah menikah – tidak termasuk janda – yang paling tinggi keterlibatan dalam forum. Selain itu, latar belakang agama dan suku dari responden dalam survey kali ini didominasi oleh Protestan (74,0% di Kota dan 97,5% di Kabupaten Kupang) dan suku mayoritas Rote (33,5%) di Kota dan Timor Dawan (78,0%) di Kabupaten Kupang.

### C. Perbandingan Tingkat Kesadaran Kewargaan

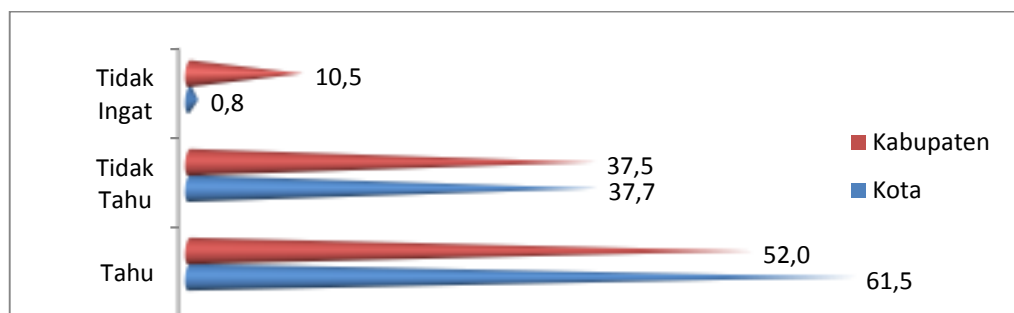
Perbandingan tingkat kesadaran kewargaan terkait pemilu beserta atribut-atribut ikutannya menjadi fokus dalam bagian ini. Setidaknya ada 4 hal utama yang menjadi fokus perbandingan kesadaran kewargaan antara sebelum adanya forum perempuan Bengkel APPEK dan setelahnya. Keempat hal tersebut mencakup pertama, sebaran informasi dan sumber informasi pemilu di kalangan kaum perempuan marginal. Kedua, antusiasme (dan) partisipasi perempuan

marginal dalam pemilu termasuk keterdaftarannya sebagai pemilih sampai dengan kepastian ikut memilih pada hari pemilihan. Ketiga, perempuan marginal dan politik identitas yang mana akan dilihat mengenai pengaruh identitas etnis dan agama dalam menentukan pilihan politik. Dan keempat akan melihat kaum perempuan di antara arus dan pusaran politik uang dalam pilkada yang makin canggih dan kian mewajar.

### 1. Sebaran, Akses, dan Sumber Informasi Pemilu

Sebaran informasi terkait pemilu terutama pemilu terdekat yakni pemilihan legislatif atau biasa disingkat pileg masih menjadi persoalan yang belum mencapai titik optimal. Walaupun demikian dari waktu ke waktu penyelenggaraan pemilu mulai membaik aksesibilitas informasinya menuju ke arah lebih baik. Survey terdahulu menunjukkan sebaran informasi tidak lebih dari 61,5% di Kota dan 52,0% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

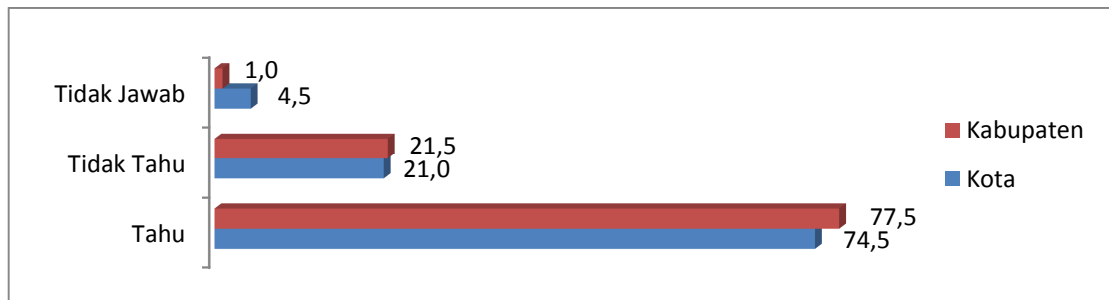
Chart 8, Sebaran Informasi Pilkada Gubernur NTT Dalam Survey Terdahulu



Sumber: Bengkel APPEK, 2013

Sedangkan survey kali ini meski isunya nasional dan cenderung lebih luas dari isu pemilihan kepala daerah (pilkada) karena menggunakan pemilihan legislatif sebagai isu utama, akan tetapi sebaran informasinya cukup baik. Setidaknya 74,5% perempuan marginal di Kota dan 77,5% di Kabupaten Kupang sudah memperoleh informasi dan tahu mengenai waktu perhelatan pesta demokrasi memilih wakil rakyat tersebut. Lihat *chart* berikut.

Chart 9, Sebaran Informasi Pemilu Dalam Survey Saat ini

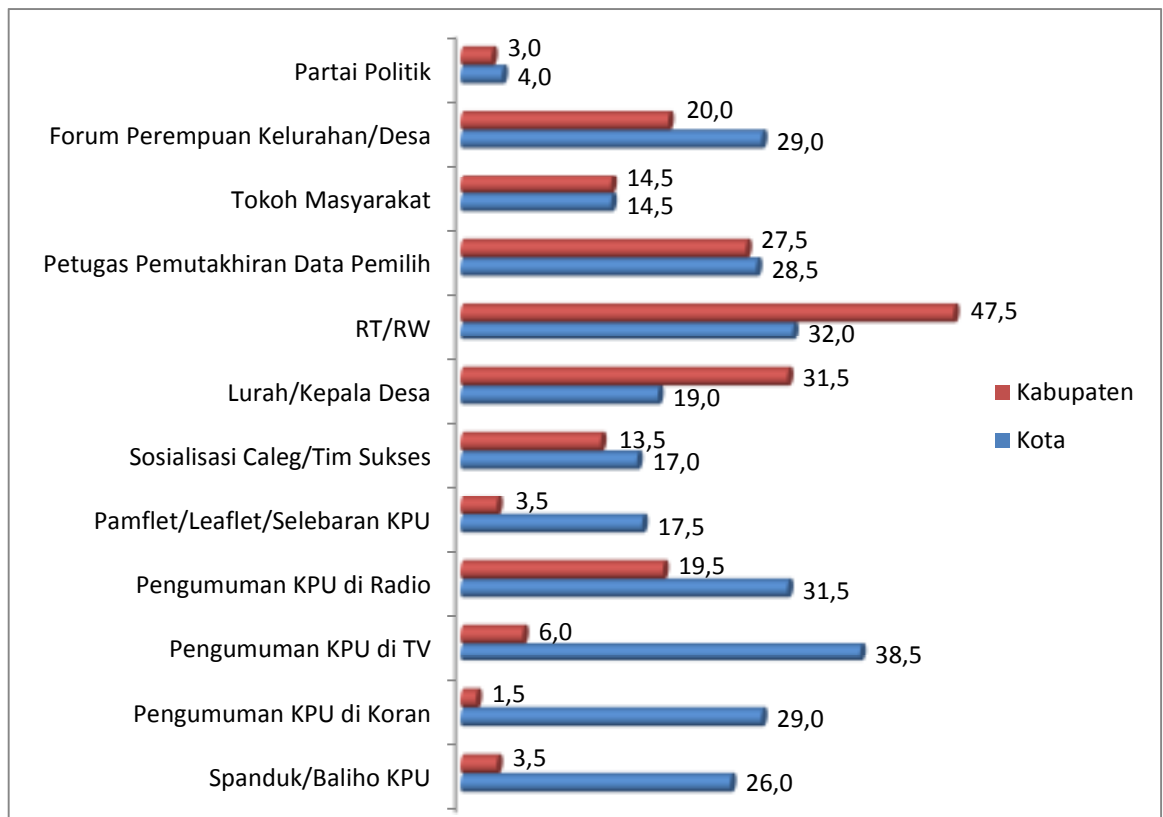


Sumber: Hasil Survey

Meningkatnya jumlah perempuan marginal yang mengetahui dan mengakses informasi pemilu mengindikasikan adanya perluasan sebaran informasi. Namun ironisnya hal ini tidak disebabkan membaiknya kinerja lembaga penyelenggara sebagai lembaga yang harusnya bertanggung jawab untuk itu. Akan tetapi justru disebabkan oleh eksternal pihak penyelenggara. Malahan perluasan sebaran informasi di Kota Kupang boleh jadi dikarenakan inisiatif perempuan marginal sendiri dalam memperoleh informasi. Kondisi ini diperlihatkan oleh ketiadaan prosentase survey yang tinggi pada variabel-variabel penyelenggara pemilu semisal pengumuman dan pemanfaatan media informasi dan atribut sosialisasi maupun petugas-petugas yang bekerja di bawah dan di dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil survey menemukan bahwa responden tidak memperoleh informasi berarti jika hanya menunggu sosialisasi pihak penyelenggara. Prosentase tertinggi perempuan marginal mendapatkan informasi dari penyelenggara hanya sampai pada angka 38,1% yakni pengumuman melalui televisi. Sedangkan di Kabupaten Kupang juga tidak jauh berbeda. Adalah perangkat RT dan RW yang memberikan kontribusi penyebarluasan informasi pemilu paling tinggi. Itupun hanya dengan 47,5%. Lihat *chart* berikut.



Chart 10, Sumber Informasi Pemilu Bagi Perempuan Marginal



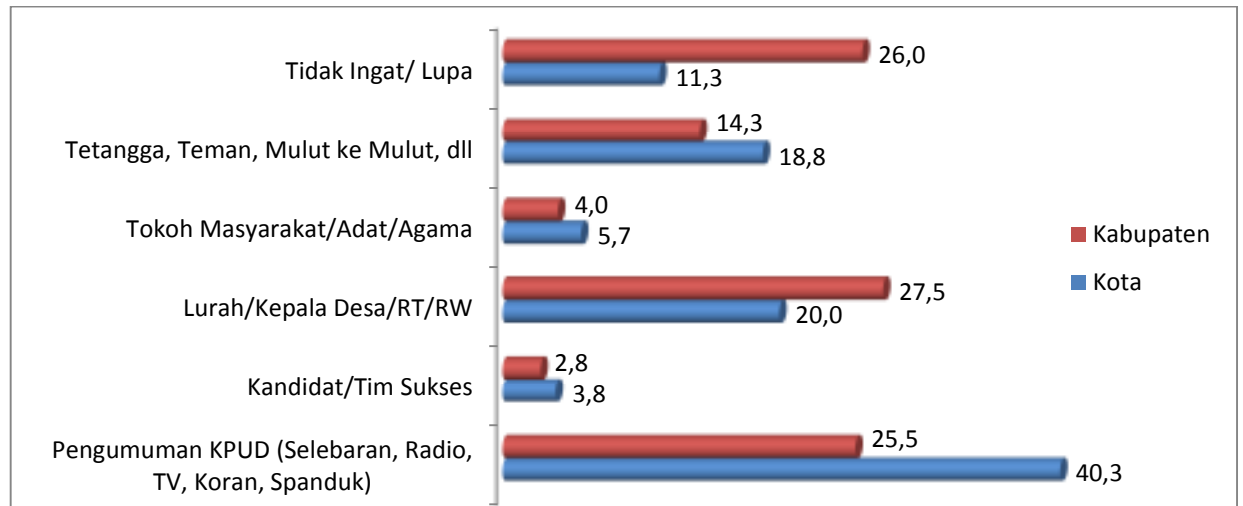
Sumber: Hasil Survey

Hasil survey terdahulu meskipun variabelnya tidak spesifik seperti survey kali ini namun prosentasenya tidak cukup signifikan. Misalnya variabel pengumuman KPUD lewat *pamphlet* atau *leaflet*, selebaran, radio, televisi, koran dan spanduk atau baliho digabungkan menjadi satu variabel. Atau juga seperti struktur pemerintahan meliputi lurah atau kepala desa dan RT/ RW tidak dipisahkan. Namun dalam survey ini variabel-variabel tersebut dibuat terpisah. Bahkan jika dahulu dimasukan variabel partai politik dan forum perempuan desa, maka survey baru-baru ini disertai dengan dua variabel tersebut.

Partai politik dalam kedudukannya sebagai salah satu unit politik yang harus menjalankan fungsi sistem politik salah satunya adalah sosialisasi rupanya tidak mampu melakukannya. Hasil survey menunjukkan peran partai politik sebagai sumber informasi di Kota hanya 4,0% dan 3,0% di Kabupaten Kupang. Partai politik belum mampu hadir bagi kaum perempuan marginal. Untuk

perbandingan visual lebih jauh mengenai hasil survey dahulu dan saat ini dapat dilihat pada *chart* 13 di atas dan *chart* 14 di bawah ini.

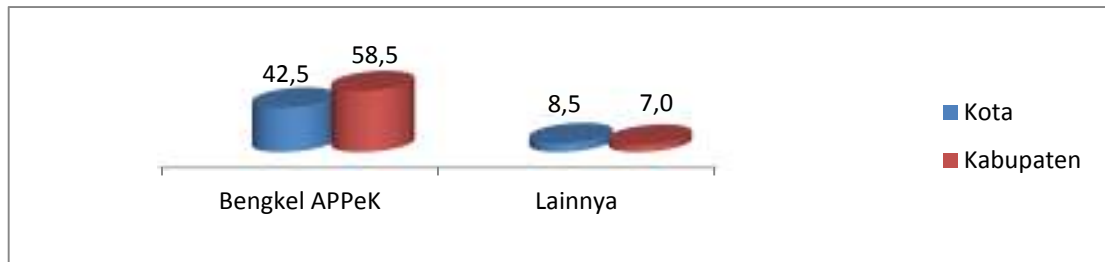
Chart 11, Sumber Informasi Pilkada Perempuan Marginal



Sumber: Hasil Survey Bengkel APPEK, 2013

Berdasarkan survey inilah kemudian Bengkel APPEK melakukan pendampingan untuk mendorong meluasnya sebaran informasi terkait pemilu melalui pembentukan forum perempuan. Mencermati hasil ini diketahui bahwasannya persoalan sebaran informasi tidak semata-mata merupakan persoalan perempuan marginal. Persoalan sebaran informasi juga merupakan persoalan lembaga penyelenggara yang memikul tanggung jawab tersebut. Terbukti dalam survey lanjutan kali ini tidak terjadi perubahan signifikan terhadap kinerja penyebaran informasi dari lembaga penyelenggara. Namun saat yang sama justru Bengkel APPEK mampu menjadi alternatif sumber informasi pemilu bagi perempuan marginal. Lihat *chart* berikut.

Chart 12, Sumber Informasi Alternatif Tentang Pemilu

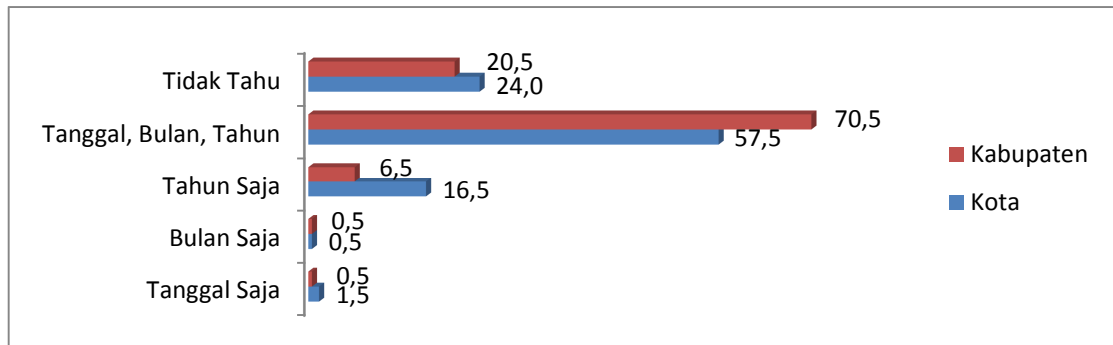


Sumber: Hasil Survey

Menarik sekaligus menyedihkan adalah ketika pihak penyelenggara dalam hal ini negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya terhadap informasi. Apalagi mengenai informasi pemilu di mana pemilu merupakan hajatan sentral dalam demokrasi prosedural seperti yang diamini oleh negeri ini. Prosentase tingkat pengetahuan responden terhadap waktu penyelenggaraan pemilu lebih banyak didapat lewat eksternalitas penyelenggara yakni Bengkel APPEK 42,5% di Kota dan 58,5% di Kabupaten Kupang. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya juga menjadi sumber informasi di kalangan perempuan marginal dengan prosentase 8,5% di Kota dan 7,0% di Kabupaten Kupang. Wajar bila prosentase Bengkel APPEK lebih tinggi mengingat lembaga ini secara sengaja dan berkelanjutan dalam kerjanya menjadikan isu perempuan marginal sebagai salah satu isu utama pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Walaupun demikian, meluasnya sebaran informasi hingga ke kalangan perempuan marginal yang selama ini terpinggirkan dari ingar-bingar demokrasi semacam ini diikuti dengan cukup baiknya ketepatan informasi perhelatan pemilu yang diperoleh. Setidaknya di Kota terdapat 57,5% dan 70,5% di Kabupaten Kupang yang tahu kapan tepatnya pemilu legislatif nanti diselenggarakan. Sejumlah responden perempuan marginal ini tahu betul tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemilu legislatif berikut. Lihat *chart* di bawah ini.

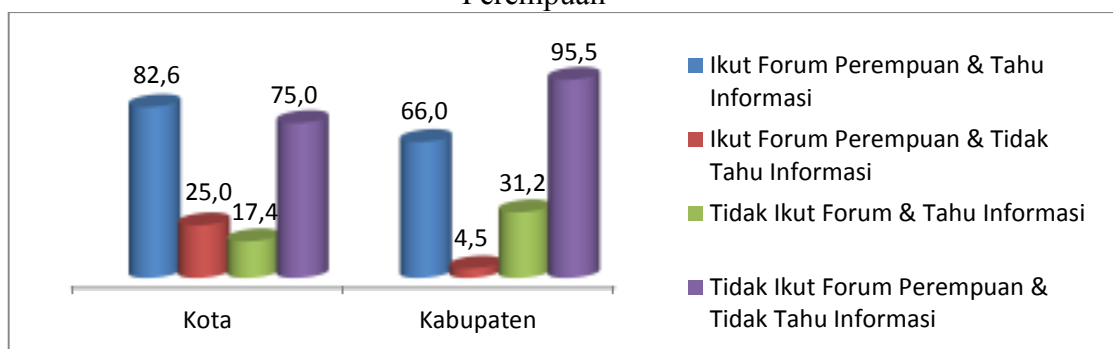
Chart 13, Prosentase Ketepatan Informasi Pemilu Perempuan Marginal



Sumber: Hasil Survey

Kalangan perempuan marginal yang terlibat dalam forum perempuan Bengkel APPEK mayoritas mengetahui informasi pemilu ketimbang mereka yang tidak ikut serta dalam forum. Terutama di Kota Kupang, persentasenya cukup tinggi dibandingkan dengan di Kabupaten Kupang. Terdapat 82,6% di Kota dan 66,0% di Kabupaten Kupang. Sejalan dengan itu, prosentase responden yang tidak mengikuti forum perempuan dan tidak mengetahui ketepatan informasi pemilu tidak jauh berbeda. Bahkan di Kabupaten Kupang cenderung sangat tinggi mencapai 95,5%. Sedangkan di Kota sebesar 75,0%. Lihat *chart* berikut.

Chart 14, Prosentase Ketepatan Informasi Pemilu Menurut Keterlibatan Dalam Forum Perempuan



Sumber: Hasil Survey

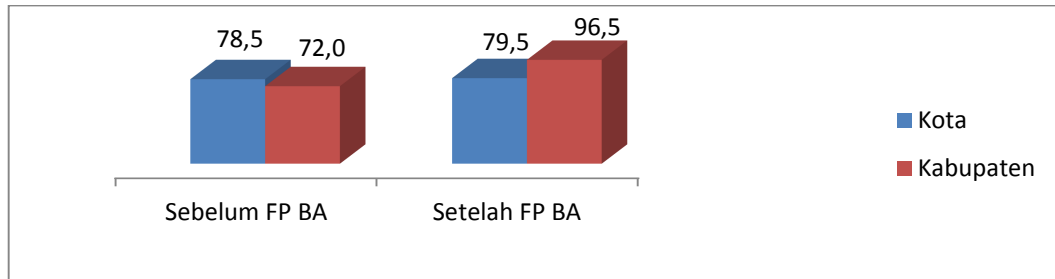
Hasil survey ini menjelaskan keikutsertaan perempuan marginal dalam forum perempuan berbanding lurus dengan membaiknya akses informasi mereka. Artinya keberadaan forum perempuan di tengah kaum perempuan marginal

menjadi penting. Hal ini juga sekaligus menempatkan forum perempuan tersebut dan tentu saja Bengkel APPeK sebagai penggagas dan pembentuk forum perempuan dimaksud pada rantai utama kebutuhan informasi perempuan marginal. Penyebaran informasi pada gilirannya bergerak meluas ke kalangan perempuan marginal. Tidak itu saja, ketepatan informasi yang diakses perempuan marginal juga meningkat.

Meluasnya sebaran informasi dan membaiknya akses serta kualitas informasi kaum perempuan marginal selain dikarenakan kehadiran forum perempuan Bengkel APPeK yang menyediakan informasi, bisa jadi juga didukung oleh kesadaran dan kemauan para perempuan marginal untuk menerima dan terlibat dalam program forum perempuan yang muncul setelah distimulasi dengan dibentuknya forum perempuan. Atau pula secara resiprokal keberadaan forum perempuan dan munculnya kesadaran dan kemauan perempuan marginal untuk mengakses informasi yang berkualitas berjalan beriringan. Apapun itu, jika dibandingkan dengan hasil survey sebelum dibentuk forum perempuan Bengkel APPeK, kesadaran dan kemauan perempuan marginal dalam mengakses informasi mengalami peningkatan.

Peningkatan sebagaimana dipaparkan di atas dalam fakta lapangannya diikuti dengan membaiknya keterdaftaran sekaligus antusiasme pemilih perempuan marginal dalam pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014 nanti. Hasil survey sebelum dibentuk forum perempuan yang diperoleh memperlihatkan prosentase keterdaftaran tidak sebaik hasil survey kali ini. Survey saat ini di Kota diperoleh tingkat keterdaftaran sebesar 78,5% dan di Kabupaten Kupang sebesar 72,0%. Artinya Saat ini terjadi peningkatan menjadi 79,5% di Kota dan 96,5% di Kabupaten kupang. Lihat *chart* berikut.

Chart 15, Perbandingan Tingkat Keterdaftaran Sebagai Pemilih



Sumber: Hasil Survey Perbandingan Dengan Survey Bengkel APPEK, 2013

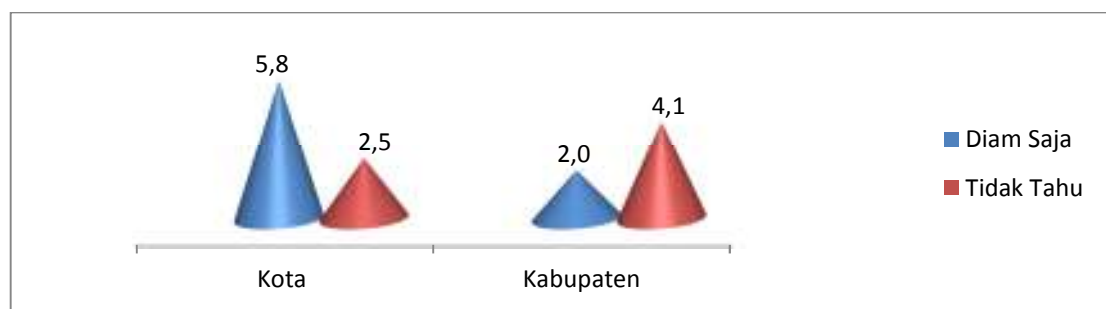
Membaik dan meningkatnya prosentase keterdaftaran perempuan marginal sebagai pemilih dalam pileg 2014 dan tentu saja pengetahuan akan keterdaftaran tersebut memberikan gambaran menarik adanya kesadaran kaum perempuan marginal akan arti pentingnya partisipasi sebagai warga negara dalam proses politik. Proses politik berupa pemilu menjadi penting bagi penentuan wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan guna membuat keputusan dan kebijakan-kebijakan bagi warga negara.

Tingkat kesadaran perempuan marginal sebagai warga negara dalam partisipasi pemilu melalui hasil survey ditemukan selaras antara keterdaftaran sebagai pemilih dan inisiatif serta kesadaran untuk mendaftarkan diri jika ternyata belum terdaftar. Sebaliknya, jika sampai dengan saat survey ini dilakukan masih ada perempuan marginal yang belum terdaftar, meskipun dengan prosentase rendah, dapat dijelaskan sebagai bukan sekadar akibat kinerja lembaga penyelenggara yang bertanggung jawab untuk itu semata. Akan tetapi juga dikarenakan sejumlah perempuan marginal tersebut apatis terhadap pemilu dengan berbagai atribut dan informasi terkaitnya.

Sebanyak 2,0% responden di Kota dan 8,0% di Kabupaten Kupang tidak terdaftar sebagai pemilih. Sejumlah perempuan marginal ini di dalamnya ada sekitar 75,0% di Kota dan 68,8% di Kabupaten Kupang tidak akan melakukan apapun atau diam dan cuek saja dengan status tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan legislatif nanti. Senada dengan hasil ini, dari semua responden yang mengikuti forum perempuan Bengkel APPEK, hanya 5,8% di Kota dan 2,0%

di Kabupaten Kupang yang diam saja dengan status terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian cuma 2,5% di Kota dan 4,1% di Kabupaten Kupang dari responden yang tidak tahu harus berbuat apa terkait status sebagai pemilih. Selebihnya kaum perempuan marginal di dua daerah otonom dengan nama yang sama ini akan berinisiatif mendatangi dan melapor pada RT/ RW, Kepala Desa atau Lurah, dan atau petugas pemutakhiran data pemilih. Lihat *chart* berikut.

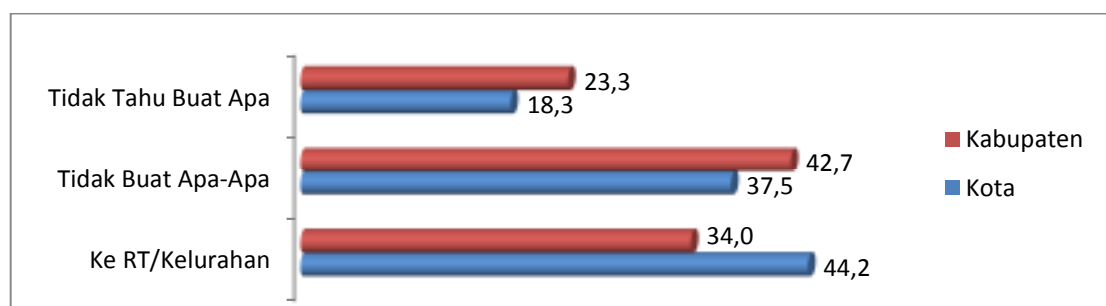
Chart 16, Apa Yang Dilakukan Jika Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih 2014



Sumber: Hasil Survey

Hasil survey ini menurun cukup tajam dari hasil survey yang dilakukan Bengkel APPEK sebelum dibentuk forum perempuan. Setidaknya terjadi penurunan hingga rata-rata tidak kurang dari 15,0%. Lihat *chart* berikut.

Chart 17, Apa Yang Dilakukan Jika Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih 2014



Sumber: Bengkel APPEK, 2013

Signifikansi peningkatan kesadaran kaum perempuan marginal dalam mengakses dan memperoleh informasi berkualitas diharapkan menjadi bagian penting yang berkelanjutan dari proses sosial politik menuju konsolidasi

demokrasi. Meningkatnya akses dan membaiknya kualitas informasi yang dimiliki kaum perempuan marginal idealnya akan mendorong antusiasme politik dan tingkat partisipasi pemilu. Antusiasme politik bergerak beriringan dengan partisipasi menjadi lebih baik ke depan. Lebih jauh akan dilihat dalam paparan selanjutnya kaitan membaiknya akses dan kualitas informasi dengan antusiasme dan tingkat partisipasi dalam pemilu nanti berbanding lurus atau justru sebaliknya. Jika berbanding lurus maka harusnya antusiasme dan partisipasi pemilu juga meningkat dan membaik kualitasnya.

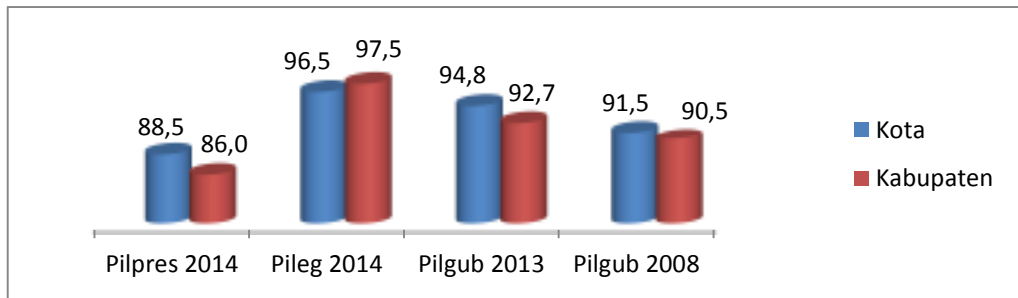
## **2. Antusiasme dan Partisipasi Dalam Pemilu 2014**

Antusiasme politik dan tingkat partisipasi perempuan marginal dalam ingar-bingar demokrasi tidak semata ditentukan oleh prosentase tinggi rendahnya jumlah. Akan tetapi juga perlu diperhatikan hingga pada tingkat kualitasnya. Idealnya, antusiasme politik yang baik akan diikuti dengan tingkat dan kualitas partisipasi pemilu yang juga baik. Antusiasme dan tingkat partisipasi perempuan marginal dapat diukur dengan menggunakan indikator keikutsertaan kaum perempuan marginal dalam pemilu legislatif dan presiden tahun 2014. Pemilu legislatif dimana antusiasme dan tingkat partisipasi pemilih perempuan marginal terus meningkat, prosentase pemilih perempuan marginal untuk indikator ini mencapai 96,5% di Kota dan 97,5% di Kabupaten Kupang. Jumlah ini lebih tinggi dari prosentase pemilih perempuan marginal dalam pemilukada gubernur lalu maupun pemilukada walikota dan bupati sebelumnya.

Senada dengan ini, antusiasme dan tingkat partisipasi kaum perempuan marginal dalam pemilu presiden cukup baik dimana di Kota terdapat 88,5% dan di Kabupaten Kupang 86,0%. Walaupun jumlahnya masih berada di bawah antusiasme dan tingkat partisipasi pemilu legislatif maupun pemilukada. Hal ini dikarenakan sampai dengan survey ini dilakukan, pemilih berlatar belakang kaum perempuan marginal belum seluruhnya menentukan pilihan politiknya terhadap calon presiden tertentu. Ini merupakan akibat dari jumlah figur yang mulai terbuka akan maju sebagai calon presiden pada pilpres nanti seluruhnya juga belum pasti. Lihat *chart* berikut.



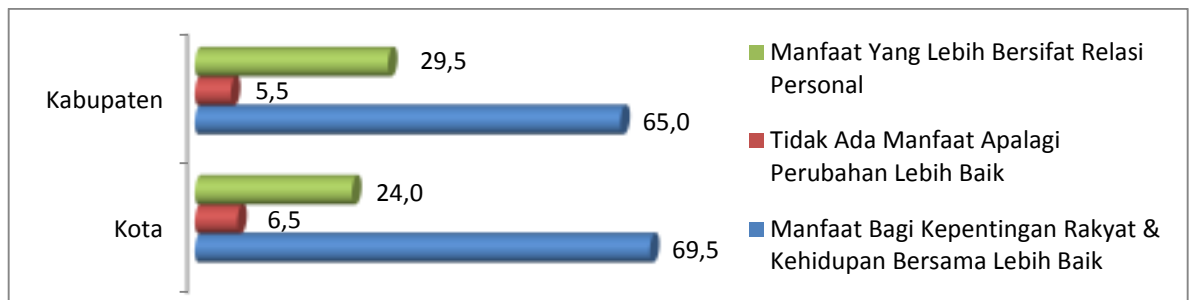
Chart 18, Perbandingan Tingkat dan Potensi Partisipasi Pemilih



Sumber: Hasil Survey

Sedangkan kualitas partisipasi pemilu kaum perempuan marginal juga dapat dikatakan mulai membaik. Kesadaran dan keyakinan cukup baik bagi pemilih dari kalangan perempuan marginal bahwa pemilu mempunyai manfaat dan merupakan wujud dari proses berdemokrasi. Sekiranya ada 69,5% responden di Kota dan 65,0% di Kabupaten Kupang menjawab pemilu akan membawa perubahan berarti menuju kepentingan rakyat dan kehidupan bersama yang lebih baik. Hanya sekitar 6,5% di Kota dan 5,5% di Kabupaten Kupang yang apatis dan tidak yakin akan adanya perubahan yang bermanfaat dengan berpartisipasi dalam pemilu. Sisanya merupakan kaum perempuan marginal yang dengan alasan-alasan emosional dan relasi personal. Lihat *chart* berikut.

Chart 19, Manfaat Pemilu Untuk Perubahan Lebih Baik

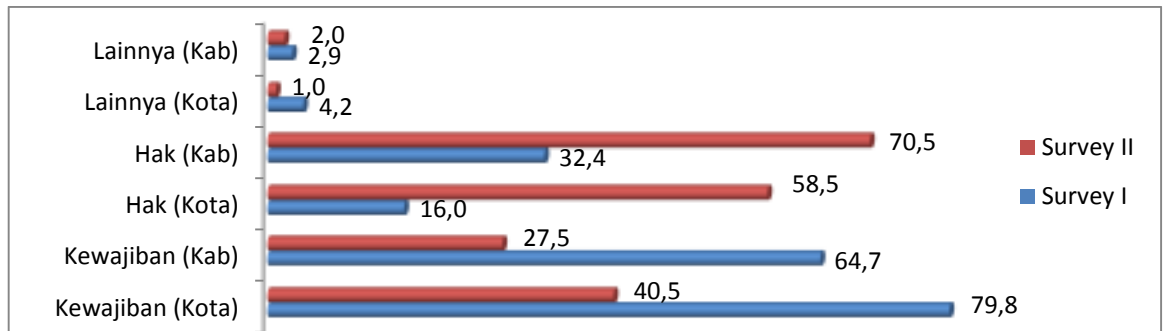


Sumber: Hasil Survey

Hasil survey di atas diikuti dengan kesadaran pemilih perempuan terhadap hak demokrasi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Setelah sekian lama terpasung oleh diktatorian Orde Baru yang menempatkan partisipasi pemilu secara prosedural adalah wajib dan (namun) dalam praksisnya justru penuh rekayasa, pemilih perempuan marginal mulai tahu bahwa partisipasi berdemokrasi atau

mengikuti pemilu adalah hak politik mereka dan bukan semata-mata kewajiban. Hal ini ditunjukkan oleh prosentase kesadaran sebagai hak politik dan demokrasi yang terus meningkat dibandingkan dengan prosentase pada survey kali lalu. Lihat *chart* berikut.

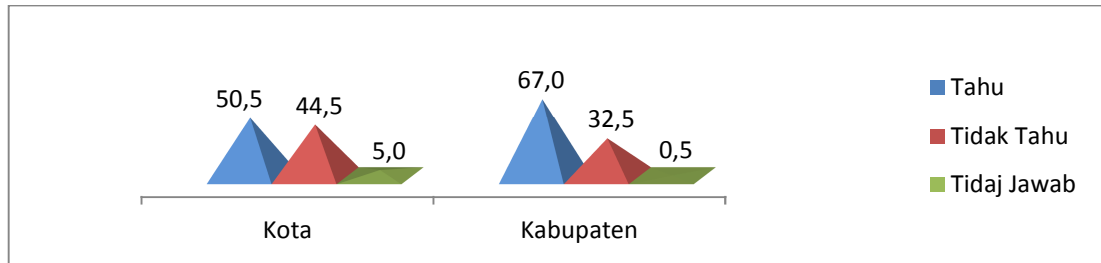
Chart 20, Perbandingan Kesadaran Hak dan Kewajiban Berdemokrasi



Sumber: Hasil Survey

Hasil survey menunjukkan terjadi perubahan tingkat kesadaran secara cukup signifikan. Kesadaran perempuan marginal sebagai warga negara dalam partisipasinya terhadap pemilu sebagai hak berdemokrasi mengalami peningkatan dari 16,0% menjadi 58,5% di Kota dan 32,4% menjadi 70,5% di Kabupaten Kupang. Sebaliknya terjadi penurunan tajam jumlah perempuan marginal yang menganggap bahwa partisipasi dalam pemilu adalah kewajiban dari 79,8% menjadi 40,5% di Kota dan 64,7% menjadi 27,5% di Kabupaten Kupang. Hal ini seperti ditunjukkan dalam *chart* 23 di atas. Meskipun terus terjadi peningkatan jumlah dan kualitas partisipasi perempuan marginal dalam pemilu namun belum sepenuhnya secara sejajar diikuti dengan pengetahuan tentang jumlah partai politik peserta pemilu. Jumlah perempuan marginal yang tahu mengenai jumlah partai politik dan yang sebaliknya tidak berbeda jauh. Prosentase di Kota sebesar 50,5% yang tahu dan 49,5% yang tidak tahu. Sedangkan di kabupaten Kupang sedikit lebih lebar jaraknya yakni sebesar 67,0% yang tahu dan 33,0% yang tidak tahu. Terlebih, di Kota maupun di Kabupaten Kupang terdapat juga sejumlah perempuan marginal yang tidak menjawab. Lihat *chart* berikut.

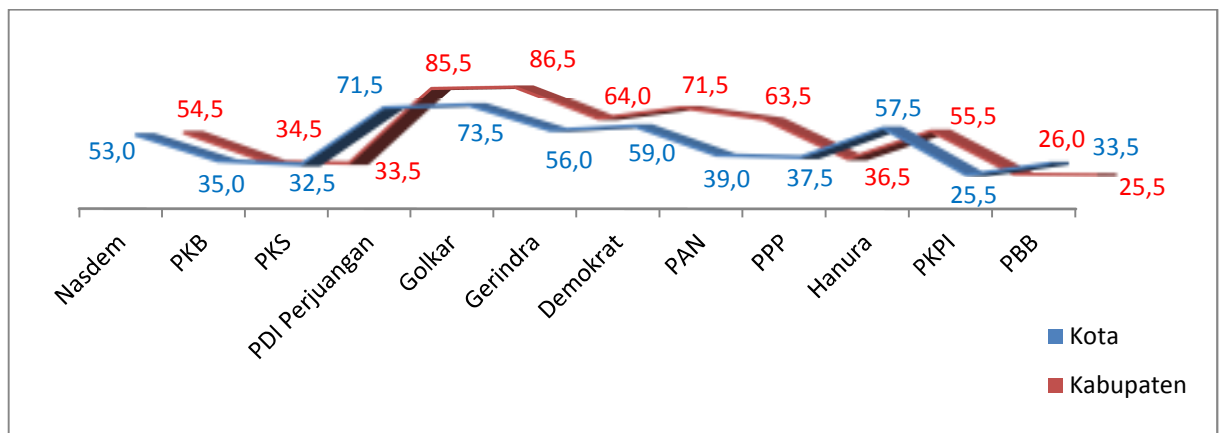
Chart 21, Prosentase Perempuan Marginal Yang Tahu dan Tidak Tahu Jumlah Parpol



Sumber: Hasil Survey

Selain jumlah partai politik yang akan ikut pemilu 2014, tidak semua kaum perempuan marginal juga tahu nama-nama partai politik tersebut. Pengetahuan mengenai partai politik ini sekaligus bisa dibaca sebagai bentuk popularitas partai-partai politik peserta pemilu 2014 di mata politik kaum perempuan marginal di Kota dan Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

Chart 22, Nama-Nama Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Yang Diketahui



Sumber: Hasil Survey

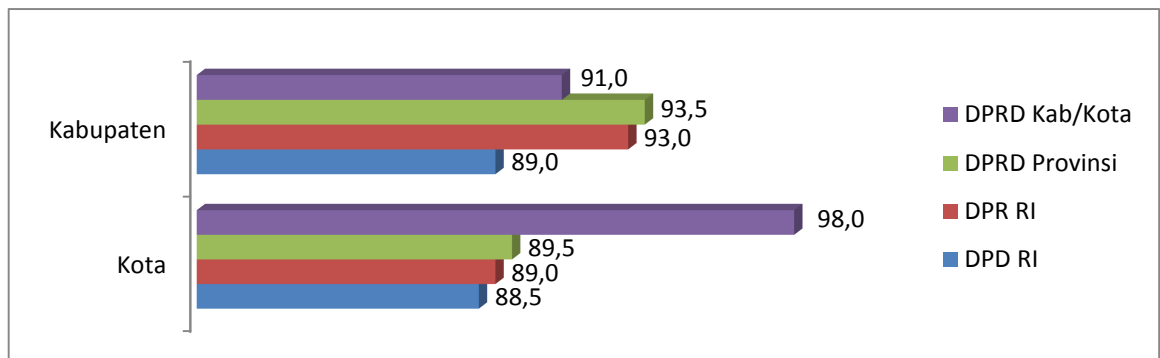
Meskipun format pertanyaannya tidak dalam bentuk konfrontasi terhadap semua nama partai politik melainkan dengan memisahkan masing-masingnya dalam format tanya tahu atau tidak tahu, namun prosentase perempuan marginal yang tahu mengenai 12 partai politik peserta pemilu 2014 di atas 50,0% hanyalah terhadap 5 partai politik di Kota dan 6 partai politik di Kabupaten. Jika diurut menurut tingkat tahu kaum perempuan marginal maka di Kota dalam 5 besar partai politik yang paling banyak diketahui adalah Golkar (73.5%), PDI

Perjuangan (71,5%), Demokrat (59,0%), Gerindra (56,0%), dan Nasdem (53,0%). Sedangkan di Kabupaten Kupang tidak jauh berbeda. Urutan 6 partai politik yang paling dikenal kaum perempuan marginal berturut-turut meliputi Golkar (86,5%), PDI Perjuangan (85,5%), Demokrat (71,5%), Gerindra (64,0%), PAN (63,5%), dan Nasdem (54,5%). Walaupun demikian, semua partai politik peserta pemilu 2014 bisa dikatakan telah dikenal oleh kaum perempuan marginal namun belum merata.

Antusiasme dan tingkat partisipasi pemilu 2014 nanti lebih jauh harus dilihat pada keterlibatan pemilih perempuan marginal dalam memilih wakil-wakil mereka di setiap tingkat perwakilan. Mulai dari tingkat perwakilan kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan perwakilan di tingkat nasional. Atau dengan kata lain mencakup DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Pertanyaannya adalah apakah tingkat partisipasi perempuan marginal akan berbanding lurus antara setiap tingkat perwakilannya? Dan apakah yang menjadi alasan kaum perempuan marginal memilih wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan yakni legislatif?

Antusiasme dan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu 2014 nanti berdasarkan hasil survey berada pada prosentase cukup tinggi. Tidak itu saja, antusiasme dan tingkat partisipasi untuk setiap tingkatannya bisa dibilang baik. Prosentase responden perempuan marginal yang menyatakan antusias dan akan ikut terlibat sebagai pemilih dalam pemilu nanti untuk setiap tingkatan berada rata-rata di atas 88,0% di Kota maupun Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

Chart 23, Prosentase Prediksi Antusiasme dan Tingkat Partisipasi Pemilu 2014



Sumber: Hasil Survey

Antusiasme (dan) partisipasi pemilu kaum perempuan marginal dominan pada pemilu legislative secara umum dalam memilih anggota DPR ketimbang DPD. Pemilih perempuan marginal yang akan memilih anggota DPR(D) rata-rata berada di atas 90,0%. Sedangkan mereka yang akan memilih anggota DPD berada di bawah angka prosentase ini. Lagi pula, pemilih perempuan marginal untuk memilih anggota DPR lebih rendah dibandingkan anggota DPRD. Tiada perbandingan lurus antar mereka dari kaum perempuan marginal yang akan memilih di antara DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI.

### 3. Politik Identitas Perempuan Marginal

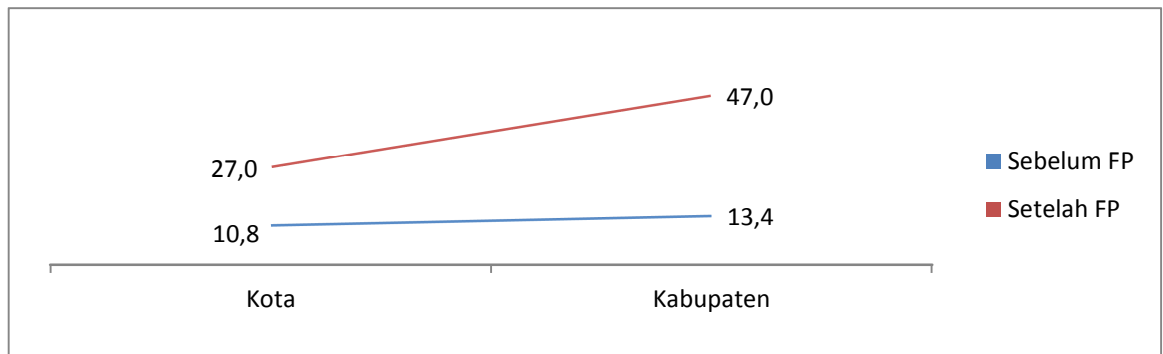
Politik identitas dalam memilih berupa agama dan suku di kalangan perempuan marginal dalam survey terdahulu memang tidak tinggi. Hal serupa juga didapat dalam survey kali ini. Akan tetapi bukan jumlahnya yang ingin dikemukakan dan dibahas disini melainkan progresifitas perubahan yang terjadi. Apakah dengan adanya forum perempuan Bengkel APPEK berpengaruh signifikan terhadap penurunan prosentase perempuan marginal yang memilih berdasarkan identifikasi politik identitas?

Hasil survey kali lalu menunjukkan ada sekitar 10,8% di Kota dan 13,4% di Kabupaten Kupang yang memilih karena alasan primordial berupa suku dan agama. Survey tersebut tidak membedakan antara memilih caleg untuk mewakili di setiap tingkatan lembaga perwakilan. Sedangkan survey kali ini, variabel suku

dan agama diambil terpisah termasuk dibedakan juga pemilihan caleg di dan untuk setiap tingkatan perwakilan.

Pertama, untuk tingkat DPRD Kabupaten/ Kota ditemukan ada 14,5% di Kota dan 32,5% di Kabupaten yang memilih wakilnya berdasarkan pertimbangan kesamaan suku. Sementara untuk pertimbangan agama sebagai identitas politik, 12,5% responden di Kota dan 14,5% di Kabupaten Kupang. Angka-angka ini sebenarnya cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan tidak terjadi penurunan signifikan antara hasil survey sebelumnya dengan survey setelah adanya forum perempuan. Bahkan jika pengukuran variabel suku dan agama digabungkan justru ada kecenderungan prosentase yang cukup memprihatinkan. Prosentase politik identitas suku dan agama di Kota mencapai 27,0% dan di Kabupaten hingga 47,0%. Lihat *chart* berikut.

Chart 24, Perbandingan Politik Identitas Sebelum dan Sesudah Ada Forum Perempuan



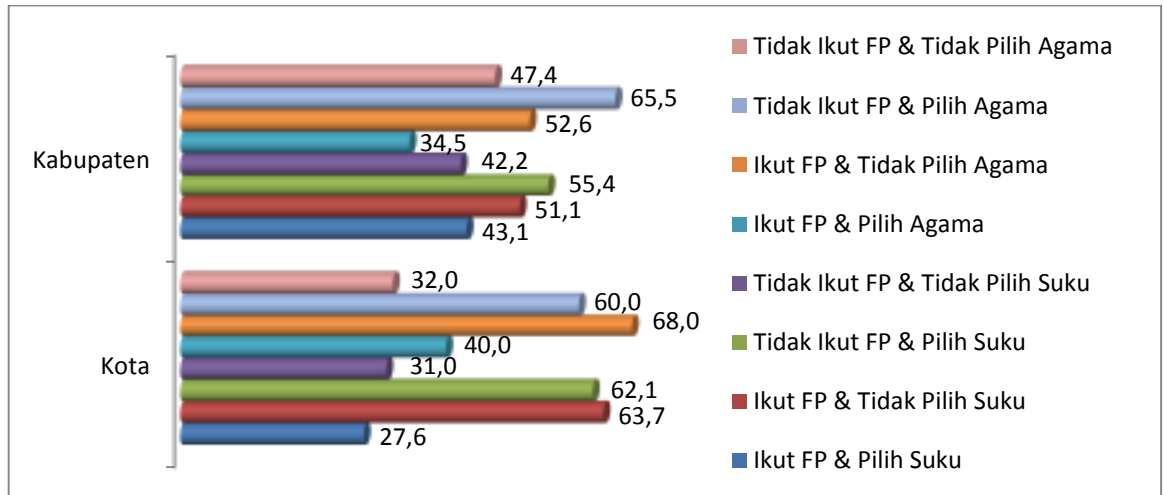
Sumber: Hasil Survey

Lebarnya perbedaan prosentase pertimbangan memilih perempuan marginal berbasis suku dan agama antara survey terdahulu dengan survey ini boleh jadi dikarenakan 4 hal. Hal-hal dimaksud meliputi (1) survey terdahulu menggunakan partisipasi pemilukada gubernur sebagai indikator utamanya dan survey ini bersandar pada pemilu legislatif, (2) pemilu legislatif memilih wakil rakyat untuk perwakilan kabupaten/ Kota didominasi oleh para caleg lokal yang mempunyai relasi identitas suku dan agama yang dekat dengan pemilih perempuan marginal,

(3) jumlah kursi yang diperebutkan lebih banyak ketimbang kursi perwakilan di tingkat yang lebih tinggi semisal provinsi dan nasional sehingga jumlah caleg di tingkat kabupaten/ kota ini lebih banyak, plural identitas sosialnya, dan cukup dekat selasi kekeluargaan dengan pemilih perempuan marginal, dan (4) survey terdahulu dilakukan sebelum penetapan nama-nama caleg sedangkan survey ini dijalankan pada saat para caleg sudah mulai melakukan kerja-kerja sosialisasi politik.

Terlepas dari 4 hal di atas, idealnya setelah forum perempuan Bengkel APPEK dibentuk, kaum perempuan marginal yang terlibat di dalamnya akan mengalami peningkatan kesadaran politik dalam memilih. Pemilih perempuan marginal mestinya mulai beranjak menjadi pemilih yang tidak lagi menggunakan identitas suku dan agama sebagai identifikasi politiknya. Pertanyaannya, apakah perempuan marginal yang mengikuti forum perempuan termasuk di dalam prosentase para pengguna politik identitas suku dan agama? Jika memang demikian maka beberapa besar jumlahnya? Hasil survey menjelaskan adanya kecenderungan menurun prosentase jumlah perempuan marginal yang mengikuti forum perempuan dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di perwakilan kabupaten/ kota dengan mendasarkan diri pada pertimbangan suku dan agama. sebaliknya, ada kecenderungan untuk lebih sering menggunakan pertimbangan suku dan agama dalam memilih wakil rakyat di parlemen kabupaten/ kota. Lihat *chart* berikut.

Chart 25,  
Preferensi Suku dan Agama Perempuan Marginal Dalam Memilih Caleg Kab/  
Kota



Sumber: Hasil Survey

Kedua, memilih anggota DPRD Provisinsi. Hasil survey menunjukkan perempuan marginal yang memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan tingkat provinsi dengan menggunakan identitas suku sebesar 14,5% di Kota dan 23,0% di Kabupaten Kupang. Sedangkan memilih berdasarkan agama sebesar 12,0% di Kota dan 14,0% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

Chart 26,  
Preferensi Politik Identitas Memilih Caleg Provinsi Sesudah Ada Forum  
Perempuan



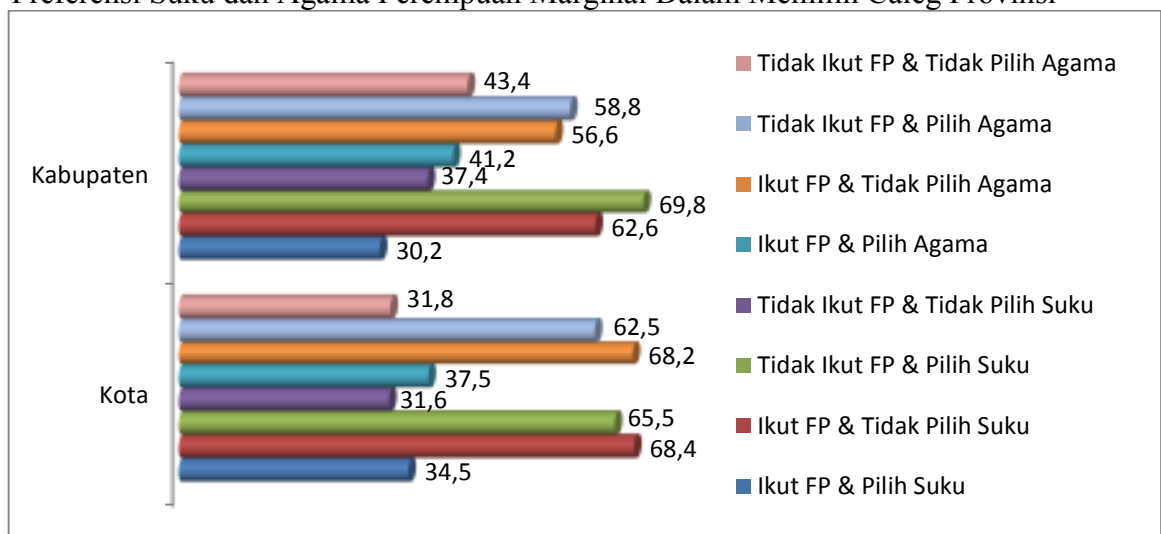
Sumber: Hasil Survey



Sejumlah perempuan marginal ini terbagi ke dalam mereka yang mengikuti forum perempuan dan yang apatis terhadap forum tersebut. Sekurangnya terdapat 34,5% di Kota dan 30,2% di Kabupaten Kupang perempuan marginal yang memilih wakilnya di provinsi menggunakan pertimbangan suku. Serupa dengan hasil ini terdapat 37,5% di Kota dan 41,2% di Kabupaten Kupang perempuan marginal yang memilih berdasarkan pertimbangan agama. Lihat *chart* berikut.

Chart 27,

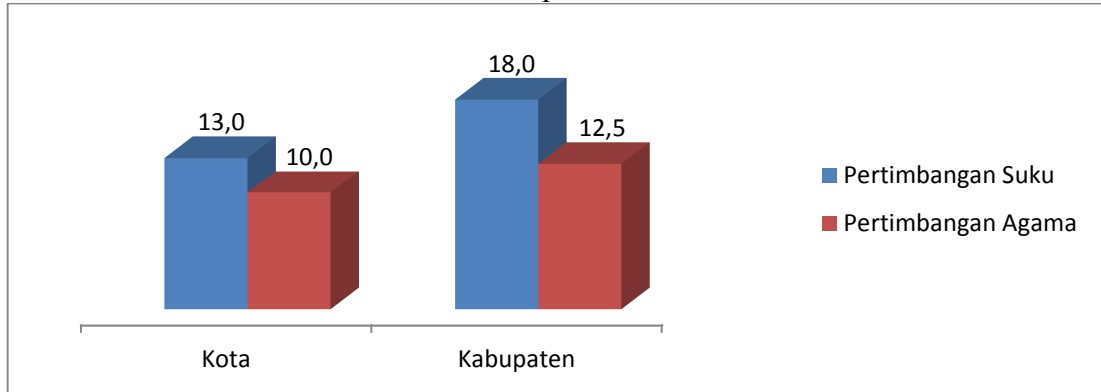
Preferensi Suku dan Agama Perempuan Marginal Dalam Memilih Caleg Provinsi



Sumber: Hasil Survey

Ketiga, perempuan marginal dalam memilih caleg DPR RI dengan mempertimbangkan kesamaan suku dan agama. Jumlah perempuan marginal dalam kategori ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memilih caleg kabupaten/ kota dan provinsi. Lihat *chart* berikut.

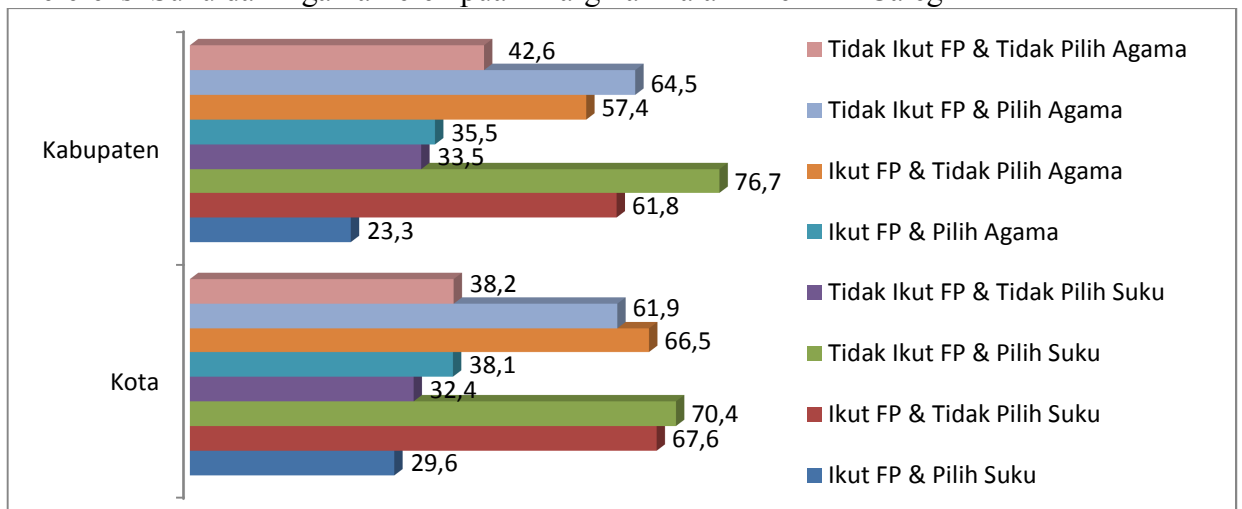
Chart 28,  
Preferensi Politik Identitas Memilih Caleg DPR RI Sesudah Ada Forum Perempuan



Sumber: Hasil Survey

Sedangkan dari jumlah perempuan marginal yang masih terperangkap sentimen suku dan agama dalam memilih caleg DPR RI ini terdapat sebagian besar di dalamnya yang mengikuti forum perempuan dan kemudian berhasil keluar dari jebakan primordialisme suku dan agama. Ada perbedaan mencolok yang menarik antara preferensi suku pemilih ketimbang agama. Preferensi suku sedikit lebih rendah persentasenya ketimbang persentase agama. Boleh jadi hal ini disebabkan jumlah caleg DPR RI lebih terbatas pilihan etnisnya sehingga pilihan agama tak terhindarkan. Lihat *chart* berikut.

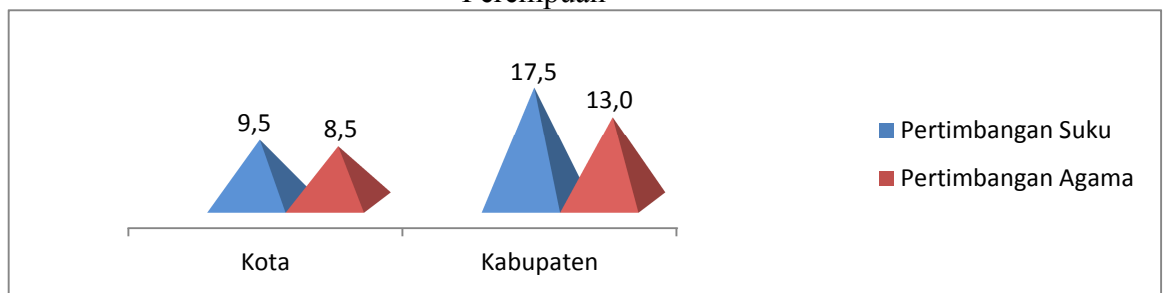
Chart 29,  
Preferensi Suku dan Agama Perempuan Marginal Dalam Memilih Caleg DPR RI



Sumber: Hasil Survey

Keempat, perempuan marginal dalam memilih calon anggota DPD RI berdasarkan kedekatan suku dan agama. Prosentase perempuan marginal yang memilih calon anggota DPD RI berdasarkan suku dan agama cukup rendah di Kota Kupang. Perempuan marginal yang memilih menurut kesamaan suku hanya 9,5%. Sedangkan yang memilih karena kesamaan agama cuma 8,5%. Sedangkan di Kabupaten Kupang tidak jauh beda dengan pemilih perempuan marginal yang memilih caleg-caleg DPRD Provinsi dan DPR RI. Terdapat 17,5% perempuan marginal yang memilih karena alasan suku dan 13,0% karena kesamaan agama. Lihat *chart* berikut.

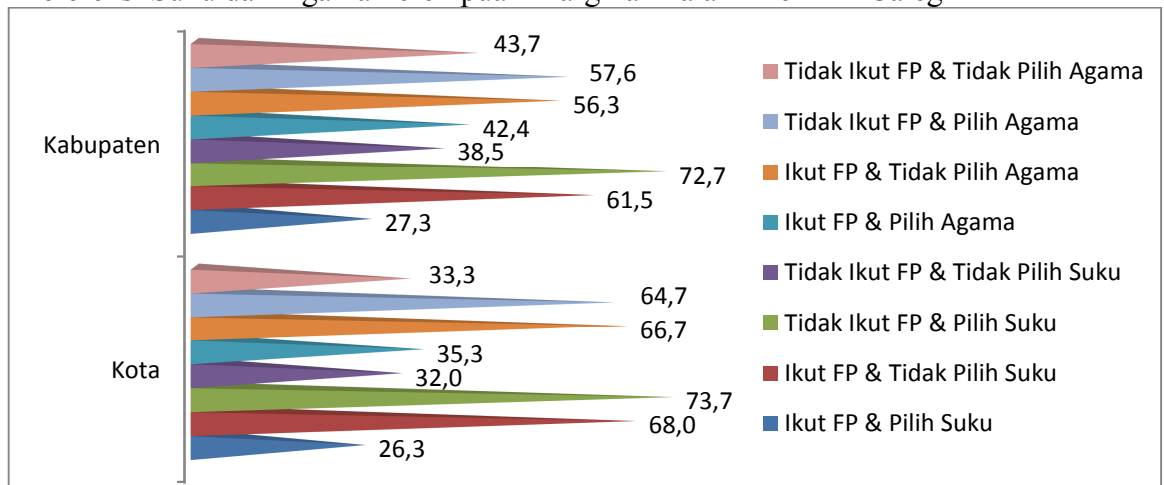
Chart 30,  
Preferensi Politik Identitas Memilih Caleg DPD RI Sesudah Ada Forum Perempuan



Sumber: Hasil Survey

Berdasarkan jumlah perempuan marginal dalam prosentase di atas, ada yang mengikuti forum perempuan dan ada yang tidak mengikuti forum tersebut. Lihat *chart* berikut.

Chart 31,  
Preferensi Suku dan Agama Perempuan Marginal Dalam Memilih Caleg DPD RI



Sumber: Hasil Survey

Politik identitas di kalangan perempuan marginal berupa identifikasi suku dan agama dalam pemilu masih saja ada. Meskipun prosentasenya rendah dan cenderung menurun. Terlepas dari itu secara umum, perempuan marginal yang mengikuti forum perempuan Bengkel APPEK mendapatkan pencerahan-pencerahan demokrasi yang tidak bertumpu pada identifikasi suku dan agama.

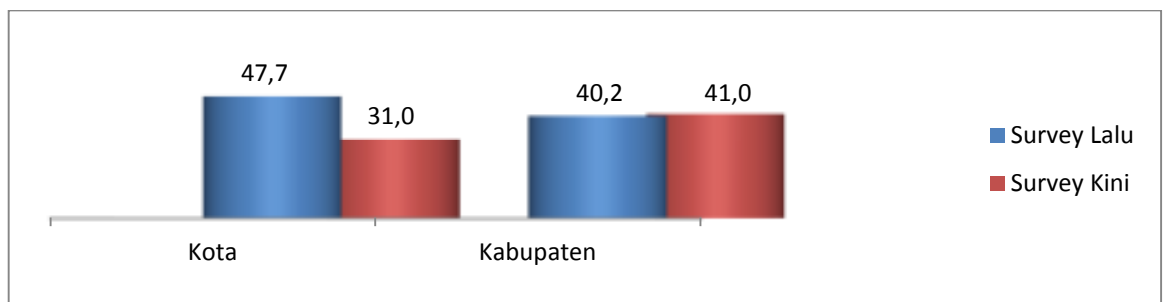
#### 4. Politik Transaksional

Selain politik identitas, politik transaksional juga menjadi perhatian survey ini. Masih dengan menggunakan ruang pemilu, survey ini menemukan beberapa hal menarik terkait politik transaksional. Politik transaksional sebenarnya merupakan sebutan lain untuk politik tanpa nilai kecuali pertukaran keuntungan ekonomis layaknya jual beli di pasar. Termasuk di dalam politik transaksional adalah politik uang, barang, dan jasa di mana transaksi atau pertukaran menjadi kata kuncinya.

Hasil survey di waktu lalu menjelaskan bahwa politik uang juga menghantui kalangan perempuan marginal. Prosentase perempuan marginal yang menerima politik uang di Kota sebesar 47,7% dan di Kabupaten Kupang sebesar 40,2%. Angka ini tentu saja cukup memprihatinkan. Keprihatinan ini belum bisa sirna akibat prosentase politik uang masih cukup menggelisahkan.

Menjelang pemilu 2014, politik transaksional masih marak terjadi. Setidaknya sejumlah perempuan marginal pernah mendengar dan mengalami politik transaksional dengan prosentase 31,0% di Kota dan 41,0% di Kabupaten Kupang. Untuk Kota, angka ini menurun cukup mengesankan. Akan tetapi untuk Kabupaten Kupang justru meningkat meskipun tidak sampai 1,0%. Lihat *chart* berikut.

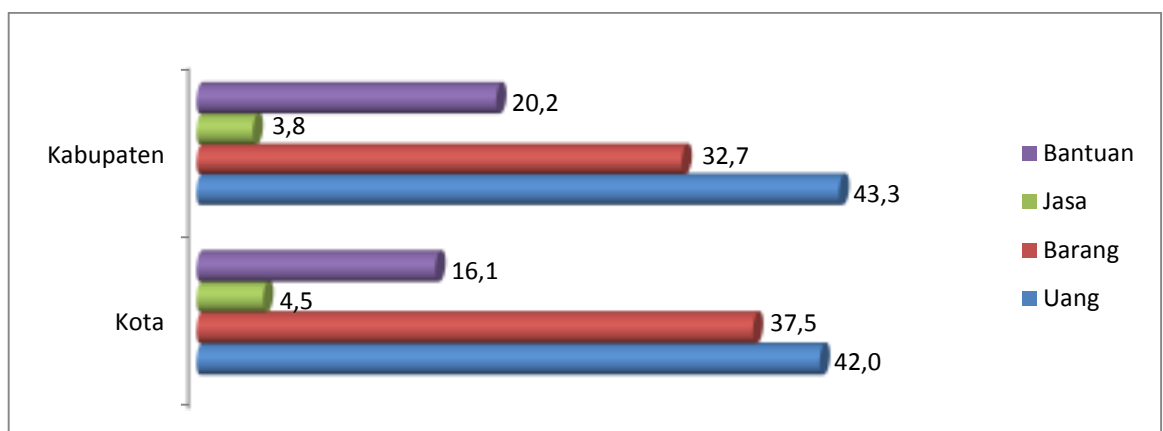
Chart 32, Politik transaksional Menjelang Pemilu 2014



Sumber: Hasil Survey

Politik transaksional yang digambarkan di atas hadir dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk dimaksud mencakup uang, barang, jasa, dan bantuan. Politik uang sebesar 42,0% di Kota dan 43,3% di Kabupaten Kupang, politik barang sebesar 37,5% di Kota dan 32,7% di Kabupaten Kupang, politik balas jasa sebesar 4,5% di Kota dan 3,8% di Kabupaten, dan politik bantuan sebesar 16,1% di Kota dan 20,2% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

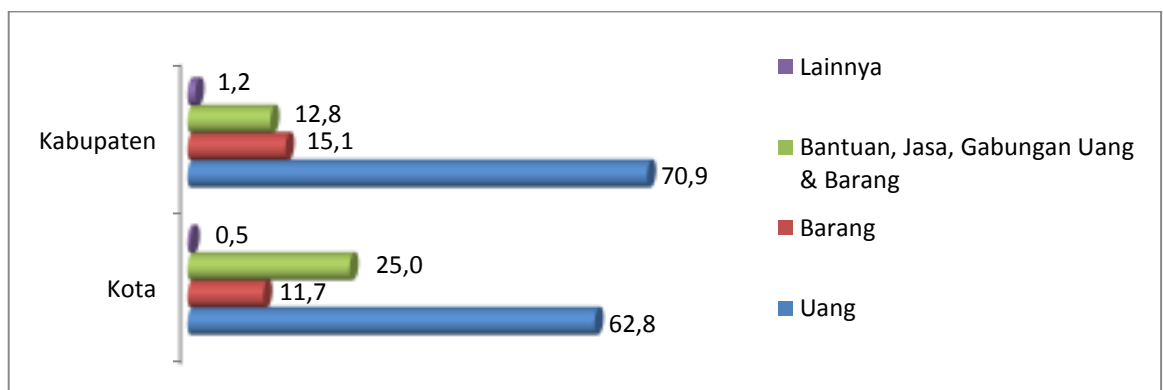
Chart 33, Bentuk-Bentuk Politik transaksional



Sumber: Hasil Survey

Angka-angka dalam *chart* di atas sedikit menurun dibandingkan dengan hasil survey sebelumnya. Hasil survey terhadap kaum perempuan marginal terkait politik uang dalam pemilukada gubernur NTT kali lalu menempatkan prosentase politik uang sebesar 62,8% di Kota dan 70,9% di Kabupaten Kupang. Sedangkan politik barang sebesar 11,7% di Kota dan 15,1% di Kabupaten Kupang. Selebihnya berupa bantuan, jasa, dan gabungan antara uang dan barang sebesar 25,0% di Kota dan 12,8% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

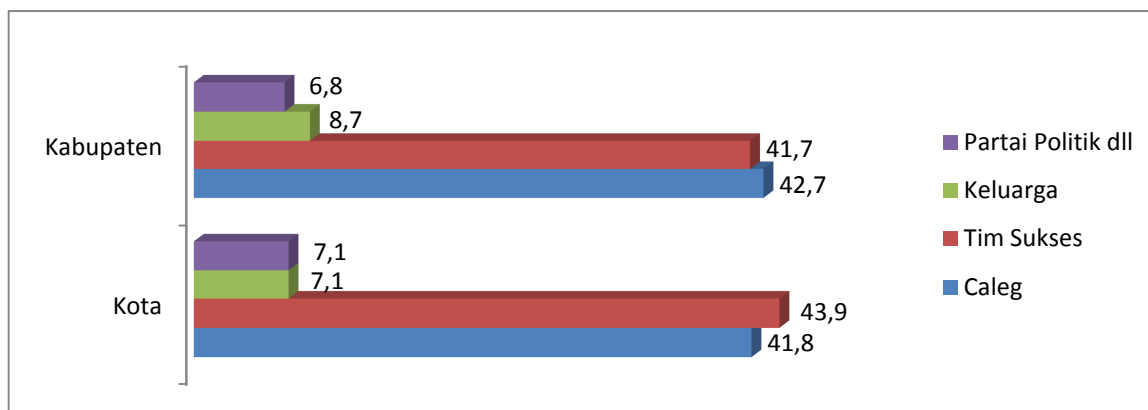
Chart 34, Bentuk-Bentuk Politik transaksional Dalam Survey Terdahulu



Sumber: Bengkel APPEK, 2013

Politik transaksional berupa uang, barang, jasa, dan bantuan di atas dalam banyak kesempatan paling banyak dilakukan oleh tim sukses dan si caleg secara langsung. Politik transaksional di Kota sebesar 41,8% dan di Kabupaten sebesar 42,7% dilakukan langsung oleh si caleg yang bersangkutan. Senada dengan caleg, justru tim sukses lebih banyak memainkan politik uang. Sekiranya terdapat 43,9% di Kota dan 41,7% di Kabupaten Kupang politik uang dilakukan oleh tim sukses. Selebihnya dilakukan oleh keluarga si caleg sebesar 7,1% di Kota dan 8,7% di Kabupaten Kupang, partai politik dan lainnya sebesar 7,1% di Kota dan 6,8% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

Chart 35, Pelaku Politik transaksional



Sumber: Hasil Survey

Hasil ini tidak memiliki perbedaan signifikan dengan hasil survey sebelumnya. Hasil survey sebelumnya dalam pemilukada gubernur ditemukan pelaku politik transaksional berupa caleg dan tim sukses secara bersama-sama (89,3% di Kota dan 68,6% di Kabupaten Kupang), keluarga dan teman dekat caleg (4,1 di Kota dan 4,7 di Kabupaten Kupang), dan seterusnya. Berkaca dari hasil survey ini, politik transaksional atau dalam survey terdahulu disebut sebagai politik uang tidak mengalami perubahan signifikan menuju ke arah politik nilai. Politik transaksional tetap saja menguat dan tersukan dimainkan oleh pelaku yang sama yakni caleg langsung, tim sukses, dan keluarga caleg.

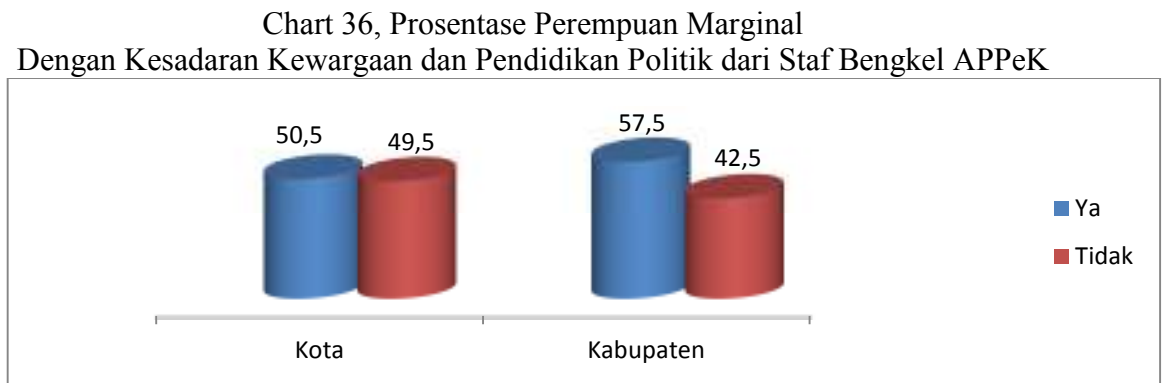
#### D. Dampak Hadirnya Forum Perempuan

Melalui rangkaian kegiatan pendampingan Bengkel APPeK mulai dari survey pemetaan tingkat kesadaran kaum perempuan marginal, pembentukan forum perempuan, dan kini survey progresifitas, satu yang juga menjadi bagian utama untuk diketahui adalah dampak yang dihasilkan. Jika pada uraian di atas telah dikemukakan perubahan tingkat kesadaran kewargaan perempuan marginal lewat akses dan inisiatif mencari informasi, antusiasme dan partisipasi politik (demokrasi), kecenderungan politik identitas, kemudian politik transaksional, maka pada sub bab ini akan dilihat 2 hal terkait dampak. Pertama adalah dampak langsung terhadap pemahaman dan aplikasi kesadaran kewargaan dalam kehidupan para perempuan marginal yang mengikuti forum perempuan Bengkel

APPeK. Dan kedua adalah dampak tidak langsung terhadap lingkungan disekitar lingkungan pergaulan sosial politik perempuan marginal berlangsung.

### 1. Dampak Langsung Terhadap Perempuan Marginal

Sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, perubahan tingkat kesadaran kewargaan dan pendidikan politik kaum perempuan marginal mendapatkan perbaikan. Membaliknya kesadaran kewargaan dan pendidikan politik diakui oleh perempuan marginal tak lepas dari peran sentral forum perempuan yang dibentuk dan terus dimotivasi oleh Bengkel APPeK melalui para stafnya yang menjadi fasilitator. Hasil survey menunjukkan bahwa 50,5% di Kota dan 58,5% di Kabupaten Kupang, perempuan marginal mendapatkan perbaikan tingkat kesadaran kewargaan dan pendidikan politik dari para staf Bengkel APPeK yang mendampingi berbagai aktivitas dan kegiatan forum perempuan. Lihat *chart* berikut.



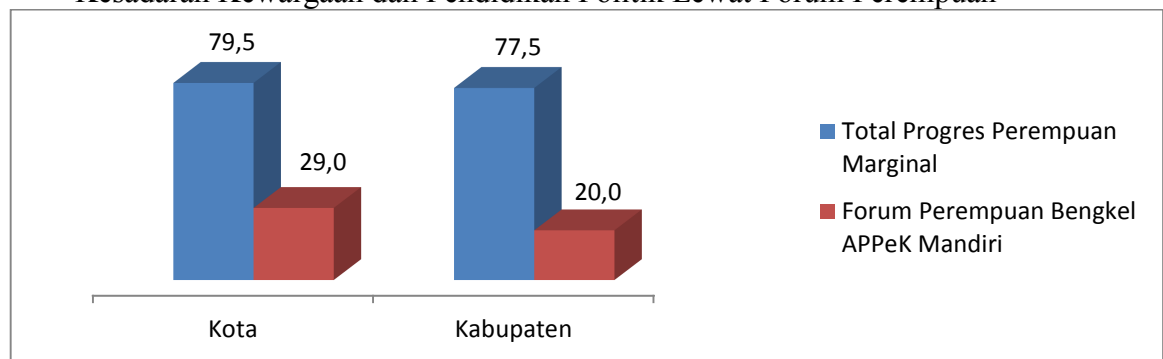
Sumber: Hasil Survey

Selain peran staf Bengkel APPeK, peran forum perempuan itu sendiri cukup penting. Forum perempuan dimaksud adalah forum yang dilakukan di tingkat desa dengan difasilitasi oleh staf Bengkel APPeK. Namun tidak sepenuhnya Bengkel APPeK mendominasi kegiatan-kegiatan forum. Melalui para fasilitatornya, Bengkel APPeK memberikan kesempatan dan otonomi yang cukup bagi para peserta forum perempuan untuk mengelola forum secara mandiri. Hasilnya cukup menggembirakan. Perempuan marginal sebanyak 29,0% di Kota



dan 20,0% di Kabupaten Kupang mendapatkan manfaat langsung dari forum yang mandiri. Dengan demikian jika diakumulasikan, maka sebenarnya ada 79,5% di Kota dan 77,5% di Kabupaten Kupang dari perempuan marginal peserta forum yang mengalami progresifitas kesadaran kewargaan dan pendidikan politik. Lihat *chart* berikut.

Chart 37, Prosentase Perempuan Marginal Yang Mengalami Progresifitas Kesadaran Kewargaan dan Pendidikan Politik Lewat Forum Perempuan



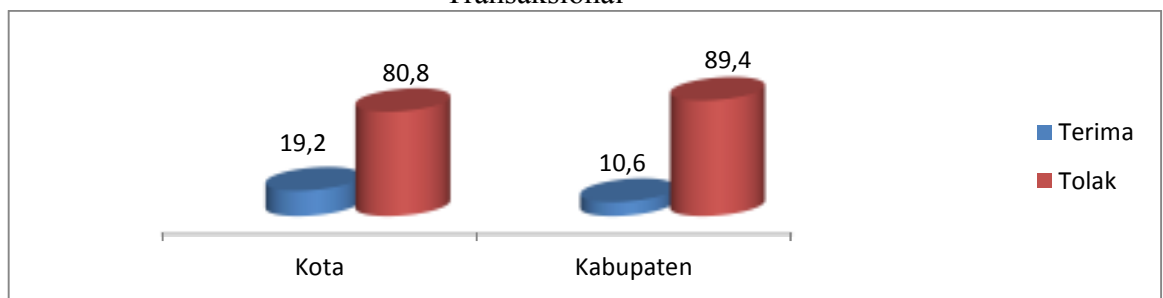
Sumber: Hasil Survey

Bentuk progresifitas kesadaran kewargaan dan pendidikan politik, selain yang sudah disampaikan di atas, dapat dilihat juga pada beberapa aspek. Aspek-aspek dimaksud antara lain seperti aspek sikap atau reaksi perempuan marginal terhadap politik transaksional, preferensi pilihan politik, sikap diri ketika terjadi perbedaan pilihan politik dengan orang lain, afirmasi terhadap caleg perempuan, dan kesetaraan hak politik laki-laki dan perempuan.

Pertama, sikap dan reaksi perempuan marginal terhadap politik transaksional. Politik transaksional disini mencakup uang, barang, jasa, dan bantuan. Berangkat dari sejumlah perempuan marginal yang tahu, melihat, dan mendengar politik transaksional (lihat *chart* 36), diketahui bahwasannya meskipun masih ada yang tetap tenggelam dengan arus materialisme tetapi juga terdapat sebagian besar telah mendapatkan pencerahan sehingga cukup progresif. Sekiranya hanya 19,2% di Kota dan 10,6% di Kabupaten Kupang dari perempuan marginal peserta forum perempuan yang tidak mengalami progresifitas. Sederet perempuan marginal ini tetap akan menerima uang, barang, jasa, dan bantuan dalam politik. Sedangkan sebagian besar perempuan marginal peserta forum perempuan lainnya yakni 80,8% di Kota dan 89,4% di Kabupaten Kupang telah

memahami buruknya politik transaksional dalam bentuk apapun. Lihat *chart* berikut.

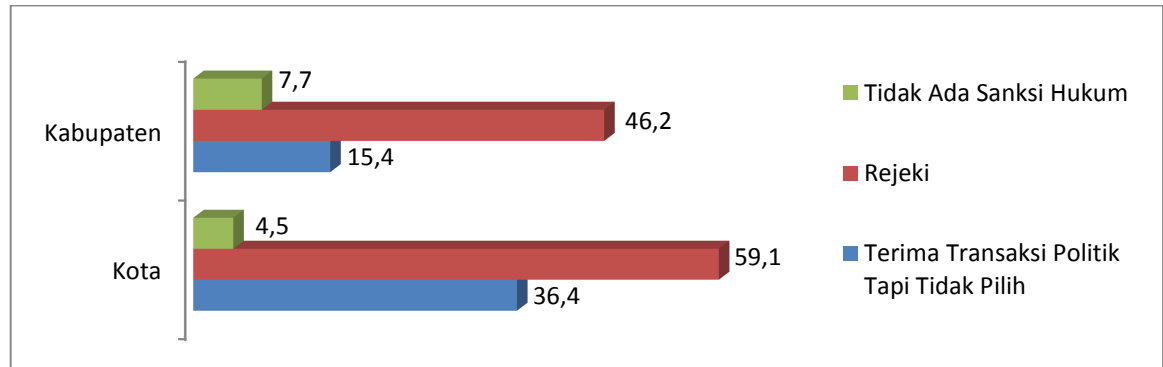
Chart 38,  
Prosentase Perempuan Marginal Peserta Forum Perempuan Terhadap Politik Transaksional



Sumber: Hasil Survey

Kedua, preferensi politik perempuan marginal terhadap politik transaksional. Menariknya memang dimana dari semua perempuan marginal yang mengaku menerima politik transaksional, terdapat sejumlah tertentu yang memutuskan untuk menerima transaksi namun tidak akan memberikan suara. Preferensi politik sejumlah perempuan marginal ini tersebar 36,4% di Kota dan 15,4% di Kabupaten Kupang. Walaupun harus diakui prosentasenya tidak sehebat mereka yang menganggap politik transaksional sebagai rejeki yang jikapun diterima tidak ada sanksi hukum apapun. Perempuan marginal yang menganggap politik transaksional sebagai rejeki sebesar 59,1% di Kota dan 46,2% di Kabupaten Kupang. Sedangkan yang menganggap dikarenakan ketiadaan sanksi hukum sejumlah 4,5% di Kota dan 7,7% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

Chart 39,  
Porsentase Preferensi Politik Perempuan Marginal Yang Menerima Politik  
Transaksional

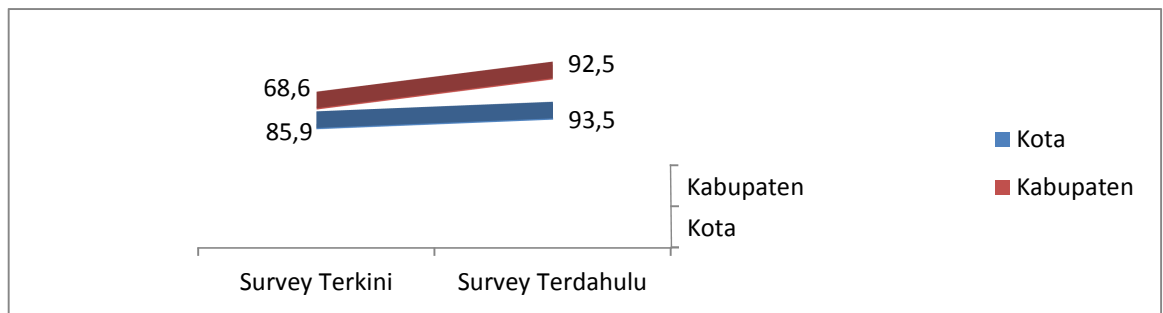


Sumber: Hasil Survey

Tingginya prosentase perempuan marginal yang menganggap politik transaksional sebagai rejeki menjelaskan bahwa pemilu merupakan salah satu momentum di mana para marginal memperoleh penghasilan tambahan. Pemilu menjadi lahan pekerjaan sampingan. Meskipun demikian secara total perempuan marginal yang menolak politik transaksional telah meningkat jumlahnya menjadi cukup signifikan (lihat *chart* 41).

Ketiga, sikap perempuan marginal terhadap perbedaan pilihan politik. Mayoritas perempuan marginal yang berpartisipasi aktif dalam forum perempuan semakin meningkat rasa toleransinya terhadap perbedaan pilihan politik. Terbukti hasil survey menunjukkan ada 93,5% di Kota dan 92,5% di Kabupaten Kupang yang akan menerima, menghargai, dan bahkan tidak terganggu dengan perbedaan pilihan politik karena dianggap sebagai hak demokrasi setiap orang. Sedangkan pada survey terdahulu terdapat sebanyak 85,9% di Kota dan 68,6% di Kabupaten Kupang yang mampu menerima dan menghargai perbedaan suku dan agama dalam politik. Lihat *chart* berikut.

Chart 40, Progresifitas Rasa Toleransi Terhadap Perbedaan Pilihan Politik

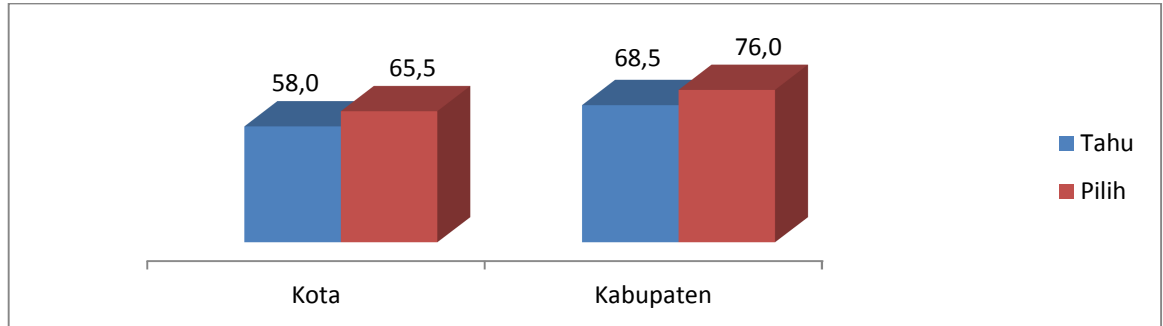


Sumber: Hasil Survey

Keempat, afirmasi terhadap caleg perempuan. Meskipun afirmasi terhadap perempuan lebih ditujukan kepada kaum laki-laki namun kaum perempuan pun harus paham dan bisa mengaplikasikannya. Afirmasi dimaksud adalah memberikan ruang dan kesempatan lebih luas kepada perempuan agar dapat mengejar ketertinggalan mereka dari kaum laki-laki. Dengan demikian afirmasi dalam hal ini terkait dengan kemampuan perempuan marginal yang mengikuti forum perempuan Bengkel APPEK untuk minimal mengenal dan mengetahui caleg-caleg berjenis kelamin perempuan. Prosentase kaum perempuan yang mengenal caleg perempuan cukup tinggi. Hal ini juga diikuti dengan jumlah perempuan marginal yang akan memilih caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014.

Prosentase perempuan marginal yang mengetahui nama-nama caleg perempuan sebesar 58,0% di Kota dan 65,5% di Kabupaten Kupang. Sedangkan jumlah perempuan marginal yang akan memilih caleg perempuan pada pemilu legislatif nanti sebesar 68,5% di Kota dan 76,0% di Kabupaten Kupang. Lihat *chart* berikut.

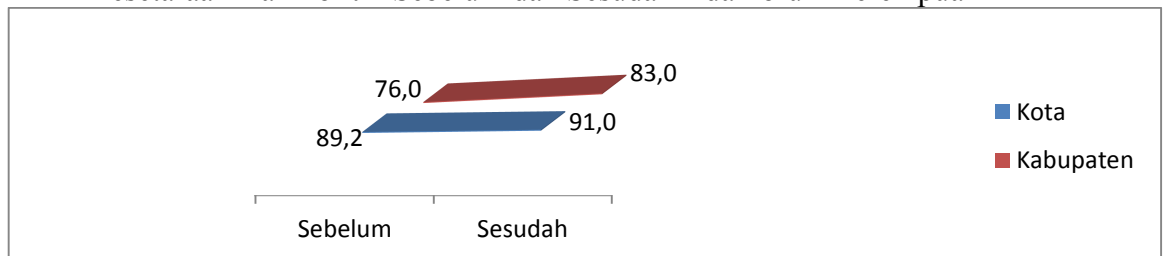
Chart 41,  
 Prosentase Perempuan Marginal Mengetahui & Memilih Caleg Perempuan Pada  
 Pemilu 2014



Sumber: Hasil Survey

Kelima, kesetaraan hak politik laki-laki dan perempuan. Jumlah perempuan marginal yang semakin tahu bahwa hak politik laki-laki dan perempuan adalah sama semakin tinggi. Setidaknya terdapat 91,0% di Kota dan 83,0% di Kabupaten Kupang. Padahal sebelumnya jumlah perempuan marginal yang memahami kesetaraan hak politik laki-laki dan perempuan di Kota sebesar 89,2% dan di Kabupaten Kupang sebesar 76,0%. Lihat *chart* berikut.

Chart 42, Perbandingan Perempuan Marginal Yang Paham Kesetaraan Hak Politik Sebelum dan Sesudah Ada Forum Perempuan



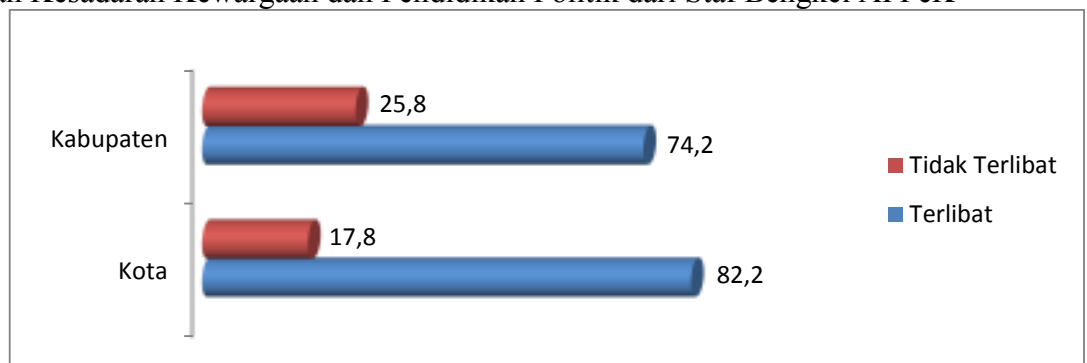
Sumber: Hasil Survey

Secara umum dampak langsung kehadiran forum perempuan Bengkel APPEK dan tentu saja keterlibatan kaum perempuan marginal di dalamnya memberikan dampak positif dan progresif bagi kaum perempuan marginal. Dampak positif dan progresif dimaksud adalah terhadap peningkatan kesadaran kewargaan dan pendidikan politik kaum perempuan marginal.

## 2. Dampak Tidak Langsung Bagi Lingkungan Sekitar Perempuan Marginal

Jika ditelusuri lebih jauh dari sejumlah perempuan marginal yang mendapatkan perbaikan tingkat kesadaran kewargaan dan pendidikan politik dari staf Bengkel APPEK, tidak semuanya terlibat dalam forum perempuan. Ada sebagian kecil perempuan marginal yang meskipun tidak terlibat forum perempuan bentukan Bengkel APPEK namun berinteraksi dengan para staf Bengkel APPEK dan peserta forum perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan perbaikan tingkat kesadaran kewargaan dan pendidikan politik. Terdapat kurang lebih perempuan marginal yang tidak mengikuti forum perempuan tetapi berinteraksi dengan staf Bengkel APPEK sebanyak 17,8% di Kota dan 25,8% di Kabupaten Kupang dari seluruh kaum perempuan marginal yang mendapatkan perbaikan tingkat kesadaran kewargaan dan pendidikan politik. Selebihnya adalah mereka yang terlibat aktif dalam setiap kegiatan forum perempuan bentukan Bengkel APPEK. Lihat *chart* berikut.

Chart 43, Status Keterlibatan FP BA Perempuan Marginal Dengan Kesadaran Kewargaan dan Pendidikan Politik dari Staf Bengkel APPEK



Sumber: Hasil Survey

Adanya sejumlah perempuan marginal yang mendapatkan progresfitas kesadaran kewargaan dan pendidikan politik tanpa terlibat langsung dalam forum perempuan Bengkel APPEK menjelaskan dampak tidak langsung yang timbul di lingkungan. Lingkungan dimaksud adalah lingkungan sekitar kaum perempuan marginal itu sendiri terutama bagi mereka yang ikut terlibat dalam forum perempuan yang berbasis di tingkat desa tersebut. Dengan begitu, dampak yang

ditimbulkan oleh sejumlah rangkaian aktivitas pendampingan Bengkel APPEK khususnya berupa forum perempuan di tingkat desa dan kelurahan cukup bermanfaat bagi perubahan kesadaran kewargaan dan pendidikan politik di kalangan perempuan di Kota dan Kabupaten Kupang.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil survey ini memberikan gambaran umum yang cukup baik terkait progresifitas kesadaran kewargaan dan pendidikan politik di kalangan perempuan marginal di Kota dan Kabupaten Kupang. Progresifitas kesadaran kewargaan dan pendidikan politik perempuan marginal terus membaik mulai dari akses dan kualitas informasi yang diperoleh, antusiasme dan potensi partisipasi perempuan marginal dalam pemilu legislatif nanti sampai dengan menurunnya preferensi politik kaum ini terhadap politik identitas maupun politik transaksional.

Tidak itu saja, dampak positif yang ditimbulkan juga cukup mengesankan. Dampak positif tidak hanya secara langsung terhadap para kaum perempuan yang ikut terlibat sebagai peserta aktif forum perempuan Bengkel APPEK. Akan tetapi lebih dari itu, dampak tidak langsung berupa efek bola salju secara perlahan mulai meluas. Meluasnya efek bola salju tersebut setidaknya terjadi melalui staf Bengkel APPEK yang menjadi fasilitator di desa dan kelurahan maupun para perempuan marginal yang mengikuti dan menjadi peserta aktif forum perempuan Bengkel APPEK.

### **B. Rekomendasi**

Hasil survey ini menunjukkan ada beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh kelompok perempuan yang tergabung dalam forum perempuan. Namun demikian ada beberapa rekomendasi lanjutan yang perlu dilakukan ke depan dalam program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Bengkel APPEK :

- Pengorganisasian kelompok perempuan dalam forum perempuan perlu diperkuat lagi mengingat pendampingan yang hanya dilakukan selama 5 bulan. Perorganisasian tersebut terutama terkait konsolidasi keanggotaan, serta pemantapan orientasi anggota untuk bergabung dalam forum diskusi ini.
- Memperdalam pengetahuan dan pemahaman kelompok perempuan menyangkut isu kewargaan, politik dan pemilu yang selama ini sudah



dilakukan. Hal ini terutama untuk menyangkut isu etnisitas dan politik uang dalam pemilu.

- Pendekatan penyebaran informasi dari fasilitator kepada kelompok perempuan perlu dilakukan secara intensif dengan metode yang lebih variatif. Diskusi kampung memang telah menjadi media efektif pendidikan pemilih, namun untuk memperluas jangkauan informasi pendidikan pemilih perlu juga dikembangkan media informasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bracking, Sarah, 2009, *Money and Power: Great Predators in the Political Economy of Development – The Third World in Global Politics*, Pluto Press, London
- Branka, Vasiljevi, 2009. *Civic Education as a Potential for Developing Civil Society and Democracy (The Case of Serbia)*, Centre for Peace Studies Faculty of Social Science, University of Tromsø, Norway
- Rohi, Rudi, 2009, Laporan Hasil Survey Preferensi Pemilih di NTT, Bengkel APPEK, Tidak Dipublikasikan.
- Syvertsen, Amy K, Constance A. Flanagan, and Michael D. Stout, 2007. *Best Practices in Civic Education: Changes in Students' Civic Outcomes* The Pennsylvania State University, USA